

# Laporan PP 39 Triwulan I Tahun Anggaran 2026



BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN  
JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan I tahun 2026 Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Triwulan I Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri tahun anggaran 2026 ini mencakup kegiatan yang dibiayai dari DIPA Tahun 2026 baik dari Rupiah Murni (RM) maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026. Dalam laporan ini juga memaparkan realisasi yang telah dicapai oleh Satker pada triwulan tersebut, serta pengawasan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kinerja unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran yang membangun sangat kami harapkan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Semarang, April 2026



A Kepala BBSPJPI *dr.*

Sofyari Rahman

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab. I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program .....	3
1.3. Struktur Organisasi .....	4
<b>Bab. II Rencana Kegiatan .....</b>	<b>6</b>
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2025 .....	6
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan .....	14
<b>Bab. III Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>20</b>
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
3.1.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	21
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan .....	77
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan .....	86
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja .....	86
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan.....	87
3.3. Langkah Tindak Lanjut .....	88
3.3.1. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja .....	88
3.3.2. Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan .....	89
<b>Bab. IV Penutup .....</b>	<b>90</b>
4.1. Realisasi Kegiatan .....	90
4.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	91
4.3. Saran dan Tindak Lanjut.....	92
Lampiran 1: Form Rencana Aksi	
Lampiran 2: Form Realisasi Rencana Aksi Triwulan I TA 2026	

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), sesuai penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga dan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Berbekal kompetensi inti di bidang pengendalian pencemaran industri, BBSPJPPI memberikan pelayanan jasa teknis yang meliputi :

- a Jasa Pelayanan Teknis Pengujian
  - Penanganan Pencemaran;
  - Pengujian Bahan dan Barang;
  - Standardisasi Pengujian Mutu Produk.
- b Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi
  - Kalibrasi Instrument
  - Kalibrasi Lingkungan
- c Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi
  - Sertifikasi Sistem Mutu
  - Sertifikasi Produk
  - Sertifikasi Industri Hijau
- d Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis
- e Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri
  - Konsultasi Keteknikan
  - Rancang Bangun dan Rekayasa
- f Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri
  - Verifikasi Besaran Nilai TKDN dan Nilai BMP
- g Jasa Pelayanan Pemeriksaan Produk Halal
- h Jasa Pelayanan Teknis Uji Profisiensi

Untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat industri, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Februari 2010, BBSPJPI telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas.

## 1.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN /PROGRAM

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPI) menetapkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Pada periode 2025-2029, BBSPJPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari kegiatan prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2025-2029, serta Kebijakan Industri Nasional 2025-2029, dimana BBSPJPI akan berkontribusi pada pelaksanaan:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi,

produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Dalam menjalankan Program/Kegiatan tahunan sebagai bagian tahapan dari pelaksanaan rencana kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan, guna mendukung capaian target dan sasaran strategis sekaligus dukungan atas pelaksanaan Tupoksi diperlukan suatu perencanaan agar pelaksanaan Program/Kegiatan dapat terarah. Perencanaan memuat program/kegiatan beserta kebutuhan penganggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan program/kegiatan sekaligus sebagai dasar acuan untuk menilai capaian/realisasi pelaksanaan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Kinerja, telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis beserta ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang biasa disebut indikator kinerja disertai target kinerja.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan monitoring kinerja dalam bentuk pelaporan kinerja yang memuat informasi capaian kinerja. Dengan laporan tersebut akan diketahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu, disamping juga sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan pencapaian program kegiatan yang sedang berjalan dengan penyerapan/realisasi anggaran.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

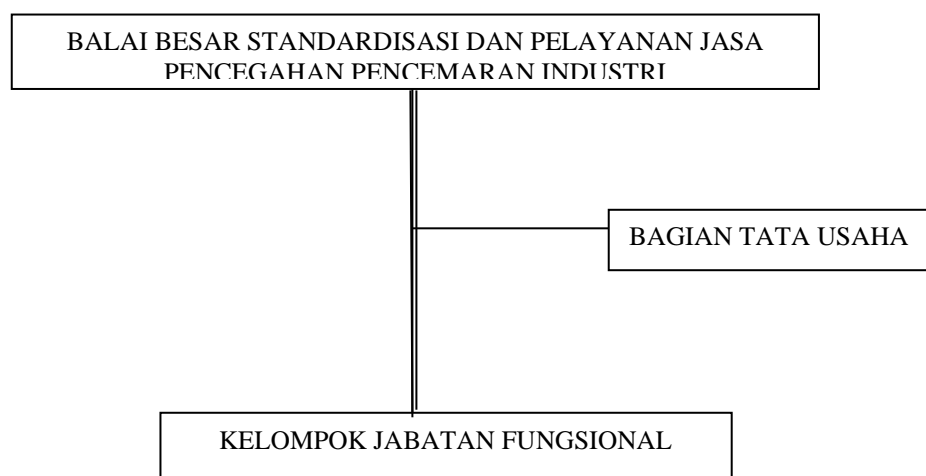
Dalam mendukung kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan kebijakan Jasa Industri dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah baku dengan seorang Kepala setingkat Eselon II, Bagian Tata Usaha

yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha setingkat Eselon III dan kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab langsung kepada kepala balai.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sementara Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana bagan berikut:



**Gambar 1: Struktur Organisasi BBSPJPI**

Dalam pelaksanaannya, pembagian fungsi koordinasi dalam kelompok jabatan fungsional disusun dengan mengacu kepada Peta Proses Bisnis BBSPJPI yang disesuaikan dan telah mengakomodir seluruh tugas dan fungsi BBSPJPI sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022. Untuk mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan dari masing-masing fungsi koordinasi tersebut ditunjuk seorang pejabat fungsional sebagai Ketua Tim Kerja.

## BAB. II

### RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN

#### 2.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBSPJPPI 2025-2029, Visi BBSPJPPI adalah "*Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju dan berkelanjutan*". Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBSPJPPI melaksanakan Misi "*Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau*". Berkenaan dengan misi BBSPJPPI di atas, kedepannya BBSPJPPI akan mendukung misi BSKJI pada ciri ke 6 (Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing) dan ke 7 (Pelaksanaan tata Kelola yang baik/gppd governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien) yaitu berkontribusi dalam mendukung pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing serta pelaksanaan tata Kelola yang baik/ good governance dalam keseluruhan aktivitas yang akuntabel, efektif dan efisien.

Kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi industri yang mendukung pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pada tahun 2026 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

2. Program Dukungan Manajemen

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal.

Terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI pada 2026 memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 41.767.656.000,-. Dalam perjalanannya, seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan maupun perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran di tingkat internal BBSPJPPI, telah dilakukan beberapa kali proses revisi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut :

a. Revisi ke-1 pada 30 Desember 2025, revisi dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

Satker BBSPJPPI memperoleh nilai efisiensi sebesar Rp. 4.457.328.000,- dalam rangka pemenuhan efisiensi untuk RO Prioritas Khusus dari sumber anggaran

Rupiah Murni sebesar Rp. 123.202.000,- dan Blokir Kode A dari sumber anggaran Non RM sebesar Rp. 4.334.126.000,-.

Pemenuhan efisiensi untuk RO Prioritas Khusus mengurangi porsi anggaran pada DIPA BBSPJPPI TA 2026 sehingga besaran anggaran berkurang dari sebelumnya Rp. 41.767.656.000,- menjadi sebesar Rp. 41.644.454.000,-.

Dengan adanya pagu blokir menyebabkan pagu efektif menjadi sebesar Rp. 37.310.328.000,-

- b. Revisi ke-2 pada 10 Maret 2026, revisi dalam rangka realokasi anggaran BBSPJPPI Tahun 2026. Sehubungan dengan pemenuhan kekurangan anggaran operasional Kemenperin, BBSPJPPI memperoleh porsi pemenuhan realokasi anggaran sebesar Rp. 13.610.000,-. Pemenuhan dipenuhi melalui realokasi anggaran Rupiah Murni yang berasal dari RO 6042.EBA.994 Layanan Perkantoran yang berasal dari pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor. Adanya realokasi anggaran menyebabkan pagu anggaran mengalami perubahan dari semula Rp. 41.644.454.000,- berkurang menjadi Rp. 41.630.844.000,-. Dengan besaran pagu blokir tetap sehingga pagu efektif berubah menjadi sebesar Rp.37.296.718.000,-
- c. Revisi ke-3 pada 13 Maret 2025, revisi dalam rangka pemutakhiran revisi anggaran pada KPA yang mengubah Petunjuk Operasional Kegiatan. Usulan revisi ini mengakomodir penyesuaian akun belanja imbalan kerja pada transaksi BLU serta rekomposisi blokir dalam rangka pemenuhan anggaran untuk biaya pemeliharaan akreditasi LPK, pemenuhan tambahan biaya operasional layanan, biaya rutin operasional dan pemeliharaan perkantoran serta belanja modal terkait layanan dan sarpras perkantoran. Revisi tanpa merubah pagu dan besaran blokir anggaran dengan besaran pagu total sebesar Rp. 41.630.844.000,- dan pagu efektif sebesar Rp. 37.296.718.000,-

Tabel 1 Pagu Anggaran Program BBSPJPPI 2026

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Awal	Revisi 1	Revisi 2	Revisi 3
<b>Anggaran BBSPJPPI</b>	41.767.656.000	41.644.454.000	41.630.844.000	41.630.844.000
<b>Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri</b>	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000
<b>1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa</b>	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000	14.829.937.000

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Awal	Revisi 1	Revisi 2	Revisi 3
<b>Industri</b>				
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	26.937.719.000	26.814.517.000	26.800.907.000	26.800.907.000
<b>2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri</b>	26.937.719.000	26.814.517.000	26.800.907.000	26.800.907.000

Berdasarkan persetujuan dan pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2026 tersebut, maka Program/Kegiatan berikut besaran pagu anggaran BBSPJPPI Tahun Anggaran 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel. 2 berikut :

Tabel 2. Program/Kegiatan BBSPJPPI Tahun Anggaran 2026

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan I		
	Pagu Terakhir	Blokir	Efektif
<b>Anggaran BBSPJPPI</b>	<b>41.630.844.000</b>	<b>4.334.126.000</b>	<b>37.296.718.000</b>
<b>Program Nilai Tambah dan Daya saing Industri</b>	<b>14.829.937.000</b>	<b>3.208.340.000</b>	<b>11.621.597.000</b>
<b>1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri</b>	<b>14.829.937.000</b>	<b>3.208.340.000</b>	<b>11.621.597.000</b>
<b>KRO 1 : Sosialisasi dan Diseminasi</b>	75.246.000	28.313.000	46.933.000
<b>KRO 2 : Pelayanan Publik Kepada Industri</b>	11.182.714.000	2.819.827.000	8.362.887.000
<b>KRO 3 : Sarana Bidang Industri dan Perdagangan</b>	3.571.977.000	360.200.000	3.211.777.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>26.800.907.000</b>	<b>1.125.786.000</b>	<b>25.675.121.000</b>
<b>2. Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Keseekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri</b>	<b>26.800.907.000</b>	<b>1.125.786.000</b>	<b>25.675.121.000</b>

Program / Kegiatan / KRO	Pagu Anggaran Triwulan I		
	Pagu Terakhir	Blokir	Efektif
<b>KRO 1 :</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	184.926.000	18.494.000	166.432.000
<b>KRO 2 :</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.671.553.000	606.812.000	24.064.741.000
<b>KRO 3 :</b> Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.101.349.000	44.228.000	1.057.121.000
<b>KRO 4 :</b> Layanan Manajemen SDM Internal	606.123.000	372.164.000	233.959.000
<b>KRO 5 :</b> Layanan Manajemen Kinerja Internal	236.956.000	84.088.000	152.868.000

Tabel 3. Klasifikasi Rincian Output dan Anggaran BBSJPPI Tahun 2026

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran Sesuai Pagu Terakhir (Rp)	Blokir (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	75.246.000	28.313.000	46.933.000
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	11.182.714.000	2.819.827.000	8.362.887.000
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.571.977.000	360.200.000	3.211.777.000
4	6042.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	184.926.000	18.494.000	166.432.000
4	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.671.553.000	606.812.000	24.064.741.000
5	6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.101.349.000	44.228.000	1.057.121.000
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	606.123.000	372.164.000	233.959.000
7	6042.EBD	Layanan Manajemen	236.956.000	84.088.000	152.868.000

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Anggaran Sesuai Pagu Terakhir (Rp)	Blokir (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)
		Kinerja Internal			
<b>Total</b>			<b>41.630.844.000</b>	<b>4.334.126.000</b>	<b>37.296.718.000</b>

Secara rinci rencana anggaran BBSPJPI Tahun 2026 sesuai DIPA revisi ke-3 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Anggaran BBSPJPI Tahun 2026

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 3	Blokir	Efektif	
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	14.829.937.000	3.208.340.000	11.621.597.000	BLU
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	14.829.937.000	3.208.340.000	11.621.597.000	BLU
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	75.246.000	28.313.000	46.933.000	BLU
101	Sosialisasi dan Diseminasi	75.246.000	28.313.000	46.933.000	BLU
52	Publikasi Layanan Jasa Teknis	75.246.000	28.313.000	46.933.000	BLU
A	Publikasi Layanan Jasa Teknis	75.246.000	28.313.000	46.933.000	
6077.BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri	11.182.714.000	2.819.827.000	8.362.887.000	BLU
001	Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran Industri	7.211.180.000	1.375.506.000	5.835.674.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	6.557.134.000	1.075.518.000	5.481.616.000	
52	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Pengujian	654.046.000	299.988.000	354.058.000	
002	Jasa penyelenggara uji profesiensi	123.360.000	22.876.000	100.484.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	81.900.000	12.546.000	69.354.000	
A	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	81.900.000	12.546.000	69.354.000	
52	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Uji Profisiensi	41.460.000	10.330.000	31.130.000	
A	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kalibrasi	41.460.000	10.330.000	31.130.000	
003	Jasa Pelayanan Produsen Bahan Acuan	62.430.000	18.815.000	43.615.000	BLU
51	Jasa pelayanan Produsen Bahan Acuan	8.240.000	4.120.000	4.120.000	
52	Akreditasi/ Surveillance /Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Produsen Bahan Acuan	54.190.000	14.695.000	39.495.000	
004	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.919.918.000	548.467.000	1.371.451.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 3	Blokir	Efektif	
51	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	1.862.228.000	548.467.000	1.313.761.000	
52	Akreditasi/ Surveillance /Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	57.690.000	0	57.690.000	
005	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	876.446.000	400.243.000	476.203.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	711.710.000	352.975.000	358.735.000	
52	Akreditasi/ Surveillance /Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	164.736.000	47.268.000	117.468.000	
006	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	373.900.000	192.010.000	181.890.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	373.900.000	192.010.000	181.890.000	
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	233.560.000	70.650.000	162.910.000	
B	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	140.340.000	121.360.000	18.980.000	
008	Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pencegahan Pencemaran Industri	399.020.000	158.400.000	240.620.000	BLU
51	Layanan Konsultasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	399.020.000	158.400.000	240.620.000	
A.	Konsultasi Design IPAL dan Penyusunan Dokumen Pertek	142.540.000	40.540.000	102.000.000	
B	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	256.480.000	117.860.000	138.620.000	
009	Jasa Pelayanan Verifikasi	157.824.000	78.912.000	78.912.000	BLU
51	Jasa Pelayanan Verifikasi TKDN	157.824.000	78.912.000	78.912.000	
010	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	58.636.000	24.598.000	34.038.000	BLU
51	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal	37.000.000	18.500.000	18.500.000	
52	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal	21.636.000	6.098.000	15.538.000	
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	3.571.977.000	360.200.000	3.211.777.000	BLU
001	Peralatan Fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	3.571.977.000	360.200.000	3.211.777.000	
51	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	3.571.977.000	360.200.000	3.211.777.000	
A.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium	3.571.977.000	360.200.000	3.211.777.000	
WA	Program Dukungan Manajemen	26.800.907.000	1.125.786.000	25.675.121.000	RM & BLU
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	26.800.907.000	1.125.786.000	25.675.121.000	RM & BLU
6042.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	184.926.000	18.494.000	166.432.000	BLU
51	Pengadaan Perangkat TIK	184.926.000	18.494.000	166.432.000	BLU
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.671.553.000	606.812.000	24.064.741.000	RM & BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 3	Blokir	Efektif	
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	353.202.000	107.046.000	246.156.000	BLU
51	Pengelolaan Data dan Informasi	353.202.000	107.046.000	246.156.000	BLU
A.	Pengelolaan Data dan Informasi	353.202.000	107.046.000	246.156.000	BLU
962	Layanan Umum	353.624.000	171.362.000	182.262.000	BLU
51	Pelayanan Tata Usaha Dan Rumah Tangga	353.624.000	171.362.000	182.262.000	BLU
A.	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	353.624.000	171.362.000	182.262.000	BLU
994	Layanan Perkantoran	23.964.727.000	328.404.000	23.636.323.000	RM&BLU
001	Gaji dan Tunjangan	19.050.750.000		19.050.750.000	RM
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.366.263.000		17.366.263.000	RM
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	1.684.487.000		1.684.487.000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.913.977.000	328.404.000	4.585.573.000	RM & BLU
A	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.723.872.000	99.480.000	1.624.392.000	RM & BLU
B	Langganan Daya Dan Jasa	945.939.000	72.000.000	873.939.000	BLU
C	Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan Kantor	876.618.000	47.489.000	829.129.000	RM&BLU
D	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	315.678.000	28.128.000	287.550.000	RM & BLU
E	Pemeliharaan Alat Laboratorium	600.000.000	60.000.000	540.000.000	BLU
F	Pemeliharaan Sarana Kantor	183.070.000	18.307.000	164.763.000	RM & BLU
G	Pengadaan Bahan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	199.800.000	0	199.800.000	BLU
H	Penyelenggaraan Poliklinik	69.000.000	3.000.000	66.000.000	BLU
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	1.101.349.000	44.228.000	1.057.121.000	BLU & RM
951	Layanan Sarana Internal	1.101.349.000	44.228.000	1.057.121.000	
51	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	688.196.000	2.912.000	685.284.000	RM
53	Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	413.153.000	41.316.000	371.837.000	BLU
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	606.123.000	372.164.000	233.959.000	BLU
954	Layanan Manajemen SDM	94.756.000	43.418.000	51.338.000	BLU
51	Pengelolaan/Manajemen SDM	94.756.000	43.418.000	51.338.000	BLU
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	511.367.000	328.746.000	182.621.000	BLU
51	Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi SDM	511.367.000	328.746.000	182.621.000	BLU
A	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis ASN	76.995.000	49.970.000	27.025.000	BLU
B	Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional	88.288.000	76.144.000	12.144.000	BLU
C	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	346.084.000	202.632.000	143.452.000	BLU
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	236.956.000	84.088.000	152.868.000	BLU
003	Layanan Kinerja Satker	185.080.000	64.480.000	120.600.000	BLU

OUTPUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			SD/CP
		DIPA Rev 3	Blokir	Efektif	
051	Penyusunan Program Dan Kegiatan Satker	27.032.000	13.456.000	13.576.000	BLU
052	Pengelolaan Keuangan	158.048.000	51.024.000	107.024.000	BLU
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	27.332.000	13.516.000	13.816.000	BLU
051	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	27.332.000	13.516.000	13.816.000	BLU
961	Layanan Reformasi Kinerja	24.544.000	6.092.000	18.452.000	BLU
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	24.544.000	6.092.000	18.452.000	BLU

## 2.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI, untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBSPJPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategis BBSPJPPI. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka juga telah ditetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	1.Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri
		2.Terwujudnya layanan jasa industri yang professional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)
			2. Nilai Net Promoter Score (NPS)
3.Terwujudnya	1. Indeks peningkatan		

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		layanan jasa industri yang mandiri	penerimaan negara bukan pajak / PNBPN (Indeks)
			2. Jumlah hasil layanan jasa industri
			3. Nilai Revenue on Asset (RoA)
			4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen		
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	1. Terwujudnya SDM yang Profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
		2. Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
			2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
		3. Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien Profesional	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)
		4. Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker.
			2. Nilai minimal Indikator Kinerja

Kode	Uraian Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
			Pelaksanaan Anggran IKPA
			3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan
		5. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Selain itu terkait dengan pelaksanaan anggaran sesuai DIPA BBSPJPI TA 2026, telah ditetapkan target keluaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 berikut

Tabel 6. Klasifikasi Rincian Output dan Target Tahun 2026

No.	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	190 Orang
2	6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	823 Industri
3	6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	44 Unit
4	6042.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9 Unit
5	6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 Layanan
5	6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	61 Unit
6	6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	105 Layanan
7	6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 Dokumen

Bahwa dalam rangka perwujudan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, telah dilakukan penyusunan dan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri dengan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebagai

bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BBSPJPPI Tahun 2026 berpedoman pada Renstra BBSPJPPI 2025-2029 dengan target kinerja ditetapkan sesuai target kinerja tahun berjalan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Indikator kinerja utama pada Perkin ditetapkan berdasarkan indikator tujuan pada Peta Strategis BBSPJPPI.

Berdasarkan pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026 pada satker di lingkungan BSKJI, ditetapkan indikator dan target kinerja Perkin tahun 2026 sebagaimana berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Perkin BBSPJPPI Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	indeks	IKU
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	990	Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	IKU
2.	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88,5	Persen	Non IKU
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	41	Nilai	Non IKU
3.	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1.	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3	Persen	Non IKU
		2.	Jumlah hasil layanan jasa industri	8.000	Hasil Layanan	Non IKU
		3.	Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,60	Persen	Non IKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	60	Persen	Non IKU
4.	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,40	Indeks	Non IKU
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40	Persen	Non IKU
		2. Tingkat Penerapan (SPBE)	78	Persen	Non IKU
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64	Indeks	Non IKU
6.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62	Persen	Non IKU
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	73	Nilai	Non IKU
7.	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	Nilai	Non IKU
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93.40	Nilai	Non IKU
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75.25	Nilai	Non IKU
8	Meningkatnya penggunaan Produk	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri	81	Persen	Non IKU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Ket
	Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	dalam pengadaan barang dam/atau jasa pemerintah			

## **BAB. III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja**

Pada awal tahun 2026 Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala BBSPJPPI kepada Kepala Badan Standardisasi Dan Kebijakan Jasa Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak kinerja Kepala BBSPJPPI.

Rencana kerja untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dirinci ke dalam rencana aksi setiap Triwulan yang dipantau secara berkala. Rencana aksi yang disusun guna mendukung upaya pencapaian target kinerja BBSPJPPI dapat dilihat pada lampiran.

### 3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

#### A. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Tabel 8. Pengukuran Realisasi Tujuan Triwulan I TA 2026

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	3,69 indeks	100,27%	25%	25%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I	B1-B3 : Penyebaran keusioner ke palanggan dengan jumlah kuesioner yang kembali Triwulan I TA 2026 sebanyak 57 buah dengan nilai 3,69.
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	298 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	30,10 %	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I	B1-B3 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi sampai TW I sebanyak 298 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi.

Tujuan terdiri dari dua Indikator Kinerja, meliputi :

**1) Indikator Kinerja Tujuan 1.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai oleh Satker diukur melalui hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode tertentu dengan cara menyebarkan kuesioner yang sudah diuji validitasnya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator ini adalah 3,69 dari target 3,68 dengan capaian 100,27 %. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Jumlah pelanggan yang dilayani 298 pelanggan dengan jumlah kuesioner 57 buah.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah

- 1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I
- 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I
- 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM TW I

Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu:

1. Bulan Januari

- 1] Kuesioner yang kembali dari Bulan Januari 2026 sebesar 22 kuesioner.
- 2] Hasil analisa IKM bulan Januari sebesar 3,72 berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017.

2. Bulan Februari

- 1] Kuesioner yang kembali dari Bulan Januari – Februari 2026 sebesar 44 kuesioner.
- 2] Hasil analisa IKM bulan Januari sampai dengan Februari sebesar 3,69 berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017.

### 3. Bulan Maret

- 1] Kuesioner yang kembali dari Bulan Januari – Maret 2026 sebesar 57 kuesioner.
- 2] Hasil analisa IKM bulan Januari sampai dengan Maret 2026 sebesar 3,69 berpedoman pada PermenPANRB NO 14/2017.

Tabel 9. Rekapitulasi Indeks IKM

Jumlah kuesioner	Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Indeks 4
57	0	1	27	29

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target fisik rencana kinerja sd Triwulan I telah berhasil dilaksanakan.

#### **b Kendala**

Tidak ada kendala. Tetapi ada hal yang jika diatasi bisa meningkatkan jumlah responden kuesioner seperti belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan ( masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis ) sehingga tidak semua pelanggan pada semua jasa layanan yang dapat diberikan kuesioner IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ). Selain itu, sistem SINDII belum mengakomodir keharusan untuk mengisi kuesioner pelanggan sebelum perusahaan mengunduh LHU mandiri.

#### **c Rekomendasi**

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner yang diblasting melalui WA dan email, platform SINDII belum bisa digunakan sebagai sarana pengisian kuesioner, sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner IKM belum dilaksanakan di media sosial BBSPJPPI serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu pintu.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah

1. Membuat tampilan kuesioner yang lebih menarik, sehingga minat pelanggan untuk mengisi kuesioner semakin meningkat.

2. Optimalisasi platform SINDII sebagai sarana dan prasarana penyampaian dan pengisian kuesioner agar dapat terealisasi dimana pelanggan diharuskan mengisi kuesioner IKM sebelum mengunduh LHU.
3. Penjadwalan sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner terintegrasi BBSPJPPI dilakukan setiap awal bulan.
4. Membuat dokumen data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu (rekapitulasi lengkap, terutama narahubung). Selain itu, dapat pula membuat database melalui SINDII berdasarkan nomor order layanan yang digunakan (nomor order masih dalam tahap pengembangan).

## **2) Indikator Kinerja Tujuan 1.2 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai - Balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Jumlah realisasi layanan dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Hal ini mengingat kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan Balai-Balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

### **a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 298 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dari target 990 perusahaan industri/pelaku usaha/instansi dengan capaian 30,10%.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25% dengan realisasi 25%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI

5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I.

Realisasi fisik dari kegiatan sampai Maret 2026 adalah capaian realisasi layanan teknis berdasarkan jumlah transaksi/order dari periode bulan Januari sampai Maret berdasarkan data berikut :

Tabel 10. Jumlah Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri

No	Jenis Layanan	Satuan	Realisasi Layanan		
			Januari	Januari- Februari	Januari- Maret
1	Layanan Pengujian	Perusahaan/ pelaku industri/instansi	99	145	167
2	Layanan Kalibrasi		10	16	18
3	Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis		1	2	2
4	Layanan Sertifikasi		34	68	72
5	Layanan Inspeksi Teknik		0	0	0
6	Layanan Konsultasi (Penyusunan Pertek)		8	8	10
7	Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)		0	0	0
8	Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL)		1	1	1
9	Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)		2	5	7
10	Layanan Pemeriksaan Produk Halal		0	1	1
11	Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi		10	18	20
12	Layanan Produsen Bahan Acuan		0	0	0
13	Layanan lainnya		0	0	0
		<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>264</b>	<b>298</b>

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target telah berhasil dilaksanakan.

#### b. Kendala

Perbandingan realisasi dengan target indikator kinerja telah berhasil dicapai. Tetapi ada beberapa kendala yang mengakibatkan capaian belum optimal antara lain :

- Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarenakan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor yang lebih murah.
- Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, audit CEMS, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan

#### c. Rekomendasi

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah industri untuk jasa layanan pengujian sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan TW I tahun 2025, namun juga terdapat peningkatan jumlah klien untuk jasa layanan lain. Pada Triwulan I 2026 belum ada kegiatan pameran yang bisa diikuti untuk sarana promosi layanan BBSPJPI.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah meningkatkan promosi baik secara *online* maupun *offline* ( pameran-pameran) , memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPJPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan.

### B. Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Profesional

Tabel 11. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 1 Triwulan I TA 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri	1. Persentase pelayanan tepat waktu	88,5 Persen	96,93 Persen	109,53 %	25%	25%	1. Melakukan review	B1-B3 : 1. Melakukan penyelesaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
	yang profesional	layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)						terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan. 6. Melakukan pemantauan dan monitoring	semua jenis layanan sesuai SPM. 2. Pemeliharaan peralatan 3. Monitoring dan evaluasi SPM layanan secara berkala. 4. Total sampel Bulan Januari-Maret 1598 sampel. Sedangkan sampel yang sesuai SPM sebanyak 1549 sampel. Sehingga SPM sebesar 96,93 %.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								sampel subkontrak untuk pengujian yang disubkontrakan.	
		2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	41 nilai	72 nilai	175,61 %	25%	25%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I.	B1 – B3: jumlah responden sampai Maret 2026 sebanyak 57 responden dengan promotor 42 responden, passives 14 pelanggan dan detractors 1 pelanggan

Sasaran Kegiatan 1, mempunyai dua Indikator Kinerja Sasaran yaitu

**1) Indikator Kinerja Sasaran 1.1 : Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA).**

Persentase Pemenuhan Waktu Layanan Sesuai Service Level Agreement (SLA) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepatuhan balai dalam memberikan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SLA atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator ini mencerminkan efisiensi dan keandalan layanan yang diberikan kepada pengguna, di mana semakin tinggi persentasenya, semakin baik kepatuhan terhadap standar waktu layanan yang dijanjikan.

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA =

$(\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SPM} / \Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}) \times 100\%$

**a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 96,93 % dari target 88,5 persen dengan capaian 109,53 %.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Total order/SPK/transaksi Januari-Maret 2026 sebesar 1.598 order/SPK/transaksi sedangkan jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah 1.549 order/SPK/transaksi.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan
2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi
3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I
5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan
6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakkan.

Realisasi Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

Tabel 12. Perhitungan SLA Januari – Maret 2026

Layanan	Januari - Maret	
	Jumlah sampel/ transaksi/Order	Sampel sesuai SPM
Layanan Pengujian	1.319	1.276
Layanan Kalibrasi	170	168
Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	22	22
Layanan Sertifikasi	75	72
Layanan Inspeksi Teknik	0	0
Layanan Konsultansi (Penyusunan Pertek)	0	0
Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)	0	0
Layanan Jasa Rancang Bangun dan	0	0

Layanan	Januari - Maret	
	Jumlah sampel/ transaksi/Order	Sampel sesuai SPM
Perekayasaan (Design IPAL)		
Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)	11	10
Layanan Pemeriksaan Produk Halal	1	1
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi	0	0
Layanan Produsen Bahan Acuan	0	0
Layanan lainnya	0	0
<b>Total</b>	<b>1.598</b>	<b>1.549</b>

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan

**b. Kendala.**

Perhitungan SLA masih manual sehingga rawan human error.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan :

- 1) Terdapat layanan yang memang belum dapat dihitung SLA nya dikarenakan kegiatan berdurasi panjang dan belum selesai hingga pelaporan, contoh : layanan PUP masih masa pendaftaran, layanan konsultasi dengan waktu pekerjaan sesuai kontrak kerjasama
- 2) SLA layanan berbasis kontrak dihitung berdasarkan kesepakatan waktu penyelesaian pekerjaan yang tertera pada kontrak, contoh: layanan konsultasi, teknologi proses dan mesin

Tindak lanjut di triwulan selanjutnya adalah :

- Dilakukan pengulangan verifikasi data kepada masing-masing tim untuk memitigasi terjadinya *human error*.

**2) Indikator Kinerja Sasaran 1.2 : Nilai *Net Promoter Score* (NPS)**

NPS adalah metrik yang digunakan untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan, dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. NPS sering dianggap sebagai prediktor utama

pertumbuhan perusahaan.

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: "Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?" Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

>**Promoters (9-10)**: Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.

>**Passives (7-8)**: Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.

>**Detractors (0-6)**: Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*.

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*)

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

#### a. Hasil yang telah dicapai dan Analisa capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 72 dari target 41 Nilai dengan capaian 175,61 %.

Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Tabel 13. Kategori pelanggan dalam NPS Januari – Maret 2026

Kategori	Jumlah
<i>Promoters</i>	42
<i>Passives</i>	14
<i>Detractors</i>	1
Total	<b>57</b>

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan.
- 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian *Net Promoter Score* (NPS) TW I.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1. Bulan Januari

- ✓ Kuesioner kembali sampai Bulan Januari sebanyak 22 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 18 pelanggan, *passives* 3 pelanggan dan *detractors* 1 pelanggan.
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Januari 2026 adalah sebesar 64,73.

2. Bulan Februari

- ✓ Kuesioner kembali sampai Bulan Februari sebanyak 44 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 33 pelanggan, *passives* 10 pelanggan dan *detractors* 1 pelanggan
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Februari 2026 adalah sebesar 73.

3. Bulan Maret

- ✓ Kuesioner kembali sampai Bulan Maret sebanyak 57 kuesioner dengan rincian *promoters* sebanyak 42 pelanggan, *passives* 14 pelanggan dan *detractors* 1 pelanggan
- ✓ Hasil analisa NPS sampai dengan bulan Maret 2026 adalah sebesar 72.

Dari data di atas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Jumlah responden pengisian NPS mengikuti jumlah responden pengisian IKM dimana tingkat pengembalian kuesioner masih rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar. Salah satu penyebabnya karena pada sistem SINDIi sebelum perusahaan mengunduh LHU mandiri tidak ada keharusan masuk ke tautan kuesioner, sehingga pengisian kuesioner bisa tidak dilakukan. Selain itu belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan (masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masih sedikitnya jumlah pelanggan yang mengisi kuesioner yang diblasting melalui WA dan email, platform SINDIi belum bisa digunakan sebagai sarana pengisian kuesioner, sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner NPS belum dilaksanakan di media sosial BBSPJPPI serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi dalam satu pintu.

Tindak lanjut di triwulan selanjutnya adalah melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi survey NPS sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan *feedback* yang kembali ke BBSPJPPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan blasting WA dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif, serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Platform SINDIi bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana keharusan pelanggan untuk mengisi survey NPS sebelum mengunduh laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, survey NPS diberikan setelah pelaksanaan audit, surveilan maupun verifikasi.

### C. Sasaran Kegiatan 2 : Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri

Tabel 14. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 2 Triwulan I TA 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
1	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 indeks	-	-	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B1: Penerimaan sampai Bulan Januari 2026 sebesar Rp. 2.412.518.394 (11,30%) dari target Rp. 21.351.876.000,- B2: Penerimaan sampai bulan Februari 2026 sebesar Rp. 3.690.844.386,- (17,29% dari target). B3: Penerimaan PNBP BBSPJPPI sampai dengan bulan Maret 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
									sebesar Rp. 4.349.272.365,- ( 20,37 % dari target)
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	8.000 hasil layanan	1.637 hasil layanan	20,46 %	25%	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B1: Jumlah layanan jasa industri Januari 2026 sebesar 495 hasil layanan. B2: Jumlah layanan jasa industri sampai Februari 2026 sebesar 1.194 hasil layanan B3: Jumlah layanan jasa industri sampai Maret 2026 sebesar 1.637 hasil layanan
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14.60 %	3,41 %	23,36%	25%	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	B1-3 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Januari-Maret 2026 2. melakukan pengesahan penerimaan Januari-Maret 2026. 3. Updating nilai buku asset satuan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I			
						% Fisik		Kegiatan	
						Target	Realisasi	Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
								4] Melakukan pertanggungjawaban belanja modal RM&BLU	kerja. Dimana Penerimaan Rp 4.349.272.365,- sedangkan asset tetap Rp.127.689.362.266
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	60 Persen	55,46 Persen	92,43%	25%	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional 3] Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dengan sumber dana RM dan/atau BLU	B1-B3 : 1.Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan Januari-Maret 2026. 2.Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU Januari-Maret 2026. 3. Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dengan sumber dana RM dan/atau BLU Januari-Maret 2026. Dimana pendapatan operasional Rp.4.349.272.365,- sedangkan belanja operasional Rp.7.841.894.556

Sasaran Kegiatan 2, mempunyai empat Indikator Kinerja Sasaran yaitu

**1) Indikator Kinerja Sasaran 2.1 : Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Disamping itu, untuk mendukung sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010, BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berkaitan dengan pengelolaan sebagai satker BLU, pencapaian kinerja dalam hal pemberian layanan jasa teknis ke pelanggan diharapkan setiap tahunnya mengalami kenaikan/peningkatan baik dari sisi kualitas layanan maupun dari aspek kuantitas realisasi penerimaan PNBP.

Cara menghitungnya sebagai berikut :

Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun **2024 sebagai baseline** (A) dibagi A dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Peningkatan PNBP} = \frac{(B-A)}{A} \times 100\%$$

Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:

Indeks	Range Peningkatan PNBP
1	$\leq 5\%$
2	$5 < x \leq 20\%$
3	$20 < x \leq 50\%$
4	$50 < x \leq 100\%$
5	$> 100$

**a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja belum bisa dihitung karena data penerimaan PNPB masih belum di akhir tahun dari target indikator sebesar 3 indeks. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI.
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1. Melakukan promosi layanan jasa pelanggan.
2. Membuat kontrak penawaran
3. Pemberian jasa layanan teknis ke pelanggan sesuai permintaan yang disepakati.
4. Penerimaan Januari – Maret 2026 sebesar Rp 4.349.272.365 dari target Rp. 21.351.876.000,- (20,37 % dari target)
5. Baseline penerimaan 2024 sebesar Rp.15.500.000.000

Tabel 15. Penerimaan Triwulan I 2026

No	Jasa Layanan	Jumlah (Rp)
1	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	2.628.745.247
2	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	374.475.000
3	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	700.110.000
4	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	91.500.000
5	Jasa Pelayanan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	236.022.340
6	Jasa Pelayanan Inspeksi dan Verifikasi Teknis	208.630.000
7	Penyelenggara Uji Profisiensi	31.200.000
8	Jasa Sertifikasi Halal	45.529.500
9	Pendapatan sewa gedung	-

10	Penerimaan lain-lain/Titipan	-
11	Jasa Giro BLU	33.060.278
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 4.349.272.365</b>

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

**b) Kendala**

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan penerimaan PNBP BBSPJPPI masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya himbauan dari DLH kepada industri untuk mengujikan di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH).
2. Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah.
3. Ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi masih terbatas.
4. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
5. Proses penagihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama.
6. Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPPI dikarenakan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPPI

**c) Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah nilai penerimaan PNBP belum sebesar nilai PNBP Triwulan I Tahun 2025.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan promosi layanan baru BBSPJPPI yang meliputi uji RATA, CGA, CEMS, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal, TKDN, dan LSP melalui penyusunan portofolio layanan yang komprehensif serta perluasan jejaring kerja (*networking*) dengan memanfaatkan media sosial resmi balai dan keikutsertaan dalam kegiatan pameran.

2. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan).
3. Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerimaan PNBP (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK).
4. Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi
5. Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPPI.

## **2) Indikator Kinerja Sasaran 2.2 : Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.

Catatan:

1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan.
2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP berbayar.

Cara Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n (tahun berjalan).

Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam tahun berjalan dengan satuan sebagai berikut:

1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
2. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
3. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Sertifikat/ Laporan)
4. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Laporan Hasil Surveillance)
5. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
6. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi/ Kajian)
7. Layanan Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin)

8. Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan)
11. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Hasil Uji)
12. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: sampel)
13. Layanan lainnya (satuan: Laporan/ order/ SPK/ rekomendasi)

**a Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 1.637 Hasil Layanan dari target 8.000 Hasil Layanan dengan capaian 20,46%. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan
- 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati
- 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPPI
- 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

- 1] Melakukan promosi jasa layanan BBSPJPPI
- 2] Memberikan jasa layanan ke pelanggan sesuai kesepakatan.
- 3] Menjalin komunikasi yg efektif ke pelanggan
- 4] Monitoring dan evaluasi capaian jumlah hasil layanan jasa industri.

Tabel 16. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Triwulan I Tahun 2026

<b>Jasa Layanan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Januari-Maret</b>
Layanan Pengujian	LHU	1.359
Layanan Kalibrasi	LHU	171
Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis	Sertifikat/Laporan	8
Layanan Sertifikasi	Sertifikat/Hasil surveilen	77
Layanan Inspeksi Teknik	Laporan Hasil Inspeksi	0
Layanan Konsultasi (Penyusunan Pertek)	Laporan Hasil Konsultasi/Kajian	10

Jasa Layanan	Satuan	Januari-Maret
Layanan Teknologi Proses dan Mesin (peralatan AiMS)	Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin	-
Layanan Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan (Design IPAL)	Laporan Hasil RBPI	1
Layanan Verifikasi (TKDN, GRK)	Laporan Verifikasi	10
Layanan Pemeriksaan Produk Halal	Laporan Hasil Pemeriksaan	1
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi	Laporan Hasil Uji	0
Layanan Produsen Bahan Acuan	Sampel	0
Layanan lainnya	Laporan/order/SPK	0
Total		<b>1.637</b>

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka telah berhasil dilaksanakan.

**b Kendala.**

Ada beberapa kendala yg mengakibatkan indikator jumlah layanan jasa industri masih dirasa belum optimal antara lain :

1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah
2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian
3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN dan penjualan produk AiMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan
4. Masyarakat tidak/belum paham tentang kompetensi BBSPJPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPJPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPJPPI meski beragam promosi telah dilakukan

**c Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan adalah pada Triwulan I 2026 belum ada kegiatan pameran yang bisa diikuti untuk sarana promosi layanan BBSPJPPI, saat ini promosi layanan dilakukan melalui media BBSPJPPI.

Tindak lanjut di triwulan selanjutnya adalah meningkatkan promosi baik secara *online* maupun *offline* ( pameran-pameran ) , memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan

hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPJPPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan.

### 3) Indikator Kinerja Sasaran 2.3 : Nilai *Revenue on Asset* (RoA)

Nilai *Revenue on Asset* (RoA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas di balai dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan operasional dengan total nilai aset yang digunakan dalam operasional instansi. Semakin tinggi nilai RoA, semakin baik tingkat produktivitas aset dalam menghasilkan pendapatan.

Cara menghitungnya yaitu Menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun ke-n dibagi dengan total nilai aset pada tahun ke- n (tahun berjalan) dikalikan 100%.

#### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 3,41 persen dari target 14,60 persen dengan capaian 23,36 % . Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU
2. Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU
3. Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan
4. Melakukan pertanggungjawaban belanja modal RM dan BLU.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Januari-Maret 2026
2. Melakukan monitoring penghapusan asset tetap pada tahun berjalan
3. Melakukan perhitungan nilai aset tetap berdasarkan nilai buku.
4. Melakukan pertanggungjawaban belanja modal RM dan BLU.

Perhitungan ROA :  $\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aset tetap}} \times 100 \%$

$$: \frac{\text{Rp } 4.349.272.365}{\text{Rp } 127.689.362.266} \times 100\% = 3,41 \%$$

**b. Kendala.**

Pada bulan Januari-Maret 2026 sedang dilaksanakan audit Laporan Keuangan T.A. 2025 yg menyebabkan nilai aset tetap pada neraca bulan Maret 2026 belum dapat merepresentasikan nilai aset tetap dengan tepat.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pada bulan Maret 2026 belum dilakukan tutup buku periode 14 tahun 2025 (Audited), perhitungan nilai ROA hanya berdasarkan pada transaksi yang sudah berjalan di TW I tahun 2026.

Tindak lanjutnya adalah Nilai aset tetap per triwulan I tahun 2026 dihitung menggunakan nilai total aset yang tersedia pada neraca bulan Desember 2025 (*Unaudited*) ditambah dengan pembelian aset (belanja modal) sampai bulan Maret 2026.

**4) Indikator Kinerja Sasaran 2.4 : Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)**

Rasio POBO digunakan dalam mengukur kemandirian UPT atas operasional layanannya dari beban operasional yang telah dikeluarkan untuk layanan publik, sering disebut juga sebagai rasio kemandirian UPT.

Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100% ditambah capaian tambahan.

$$\text{POBO} = (\text{Pendapatan Operasional} / \text{Biaya Operasional}) \times 100\%$$

Catatan:

1. Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)".
2. Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran RM APBN dan pendapatan PNBP, **tidak termasuk** penyusutan, dan amortisasi.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 55,46 % dari target 60% dengan capaian 92,43% .Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan tersebut adalah :

- 1] Melakukan monitoring penerimaan BLU
- 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional
- 3] Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dengan sumber dana RM dan/atau BLU.

Kegiatan yang dilakukan selama Triwulan I adalah

1. Melakukan monitoring penerimaan BLU bulan Januari-Maret 2026.
2. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU periode Januari-Maret 2026.
3. Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dengan sumber dana RM dan/atau BLU

Pendapatan Operasional : Rp. 4.349.272.365,-

Belanja Operasional (tidak termasuk penyusutan, dan amortisasi) : Rp. 7.841.894.556,-

$$\text{POBO} = \frac{4.349.272.365}{7.841.894.556} = 55,46 \%$$

**b. Kendala**

Sampai dengan bulan Maret 2026 belum dilakukan tutup buku periode 14 tahun 2025 (Audited) karena sedang dilaksanakan audit Laporan Keuangan T.A. 2025, sehingga Laporan Operasional belum dapat merepresentasikan jumlah pendapatan dan belanja operasional dengan tepat.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pada bulan Maret 2026 belum dilakukan tutup buku periode 14 tahun 2025 (Audited), perhitungan nilai POBO hanya berdasarkan pada transaksi yang sudah berjalan di TW I tahun 2026.

Tindak lanjutnya adalah karena sampai dengan bulan Maret 2026 belum dilakukan jurnal balik atas transaksi pendapatan & belanja tahun 2025, sehingga pendapatan operasional dapat dihitung menggunakan total realisasi penerimaan BLU sampai bulan Maret 2026, sedangkan belanja operasional dapat dihitung menggunakan total realisasi pengeluaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran per Maret 2026 (tidak termasuk belanja modal) ditambah transaksi yang mempengaruhi secara akrual seperti persediaan awal dan dikurangi sisa persediaan bulan Maret 2026.

#### D. Sasaran Kegiatan 3 : Terwujudnya SDM yang professional

Tabel 17. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 3 Triwulan I TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.40 Indeks	81,40 Indeks	100 %	25	25	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	B1-3 : 1.Menyusun rencana peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. 2.Fasilitasi diklat 3.Pembaharuan informasi pendidikan dan pelatihan pegawai.

Sasaran Kegiatan 3 mempunyai satu Indikator Kinerja yaitu **Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)**

##### 1) Indikator Kinerja Sasaran 3.1 : Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesional ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan

evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimana pelatihan tidak dibatasi jam pelajaran, dan sifat pelatihan tidak terbatas pada pelatihan yang terkait layanan jasa. Selain pelatihan yang bersifat baku, kegiatan peningkatan kompetensi lainnya seperti Bimtek, *Workshop*, Seminar dan sebagainya dapat diakui.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 81,40 indeks dari target 81,40 indeks dengan capaian 100 %. Nilai ini berdasarkan perhitungan mandiri tim Pokja OSDM BBSPJPI. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi 25 %.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural.
- 2) Pelaksanaan workshop/Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai.
- 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala.
- 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah :

1. Evaluasi rencana dan Realisasi peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.
2. Pembaruan Informasi Pendidikan & Pelatihan Pegawai.
3. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional.
4. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi di Bulan Januari (Pelatihan & Sosialisasi Skema Sertifikasi Produk dan Peraturan Terkait; Inhouse Training Pemahaman SNI ISO 17025:2017, K3 Laboratorium, Pengelolaan Limbah Laboratorium dan Pengambilan Contoh Air, Air Limbah, Air Laut Limbah Padat B3, Plankton dan Bentos; Pelatihan Internal Kalibrasi).
5. Fasilitasi Diklat Struktural/Fungsional Sosialisasi Bulan Februari (Pelatihan Internal Teknik Pengambilan Contoh Udara; Pelatihan Ketidakpastian Pengukuran Pada Laboratorium Kalibrasi; Pelatihan Alih Pengetahuan (Knowledge Transfer) Infrastruktur Teknologi Informasi (SINDII) BBSPJPI).
6. Fasilitasi Diklat Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi di Bulan Maret 2026 (Webinar Kepegawaian BKN).

**b. Kendala**

Tidak ada kendala tetapi ada beberapa hal yang jika diatasi bisa meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN seperti :

1. Realisasi PKN belum dapat direncanakan karena pimpinan masih melaksanakan tugas tambahan khusus diluar satker BBSPJPPI
2. Blokir Anggaran tahun 2026 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan layanan jasa baru tertunda
3. Beberapa Jabatan Fungsional memiliki kuota terbatas dan berbayar sehingga ada ketergantungan dengan penyelenggara (instansi pembina) & ketersediaan anggaran
4. Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlewat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan ini adalah

- IP-ASN dihitung dalam lingkup PNS (tidak termasuk PPPK)
- Blokir Anggaran mengakibatkan realisasi pelaksanaan peningkatan kompetensi personil tertunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
- Optimalisasi Realisasi Kegiatan yang tersedia menunggu ketersediaan Anggaran dari Pendapatan BLU
- Realisasi Fasilitasi Pelatihan masih belum sesuai dengan rencana usulan karena batasan ketersediaan kuota & anggaran untuk PKN, PKA & Diklat Fungsional
- Terdapat beberapa realisasi pelatihan teknis diluar rencana, akibat perubahan regulasi, hasil audit & kebutuhan jasa layanan baru.

Tindak lanjut triwulan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persetujuan realisasi pelatihan yang diusulkan tahun 2026, monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar, koordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara PKN & PKA, mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi, mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat dan mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai.

### E. Sasaran Kegiatan 4 : Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik

Tabel 18. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 4 Triwulan I TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40 Persen	20 Persen	50 %	25	25	1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI	B1: Melakukan identifikasi analisis kebutuhan data jenis layanan sesuai dengan update manual API V.7 B2: Penyesuaian manual operasional modul keuangan B3: Evaluasi ujicoba integrase data untuk layanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi.
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	78 Persen	20 Persen	25,64 %	25	25	1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan	B1-3: 1] Melakukan pemetaan seluruh infrastruktur SPBE BBSPJPPI (SINDI, UDARAKU, WEBSITE, IOT) serta menginventarisasi aset TIK untuk kebutuhan penyusunan usulan anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								dan tahap implementasi	SPBE 2] Menganalisis semua kebutuhan tata kelola SPBE sebagai bahan penyusunan dokumen usulan anggaran SPBE 2027 3] Penyusunan dokumen Usulan Rencana Anggaran SPBE BBSPJPPI Tahun 2027 serta penyampaian ke Pusdatin Kemenperin
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4..64 indeks	-	-	25	25	1] Mengevaluasi/mereviu nilai IPP Tahun sebelumnya. 2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi. 3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala. 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan	B1-3 : 1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
								5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin	benar 3) Memutakhirkan konten SIPPN dan website 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan.

Sasaran Kegiatan 4 mempunyai tiga Indikator Kinerja Sasaran yaitu

**1) Indikator Kinerja Sasaran 4.1 : Persentase Jenis Layanan Yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI.**

Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang terintegrasi merupakan suatu kebutuhan bagi BSKJI karena saat ini setiap Satker yang memiliki pelayanan publik menggunakan *platform* yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pimpinan dan stakeholder terkait dalam mengakses informasi layanan publik yang telah diberikan oleh setiap Satker.

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang

lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI.

Catatan:

Secara akumulatif, pada tahun 2025 target integrasi layanan pengujian, bertambah di tahun 2026 layanan sertifikasi, 2027 layanan kalibrasi, 2028 layanan bimbingan dan pendampingan teknis, 2029 layanan konsultasi.

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n} \div \text{Total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n} \times 100\%$

Contoh 1:

Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = 1/5 \times 100\% = 20\%$$

Contoh 2:

Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = 2/5 \times 100\% = 40\%$$

Contoh 3:

Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi

(B) sehingga

$$\% \text{ Jenis layanan yang terintegrasi} = 2/5 \times 100\% = 40\%$$

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 20% dari target 40% dengan capaian 50%. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25% dengan realisasi 25%.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

1. Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi
2. Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

1. Bulan Januari

- 1] Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan data jenis layanan sesuai dengan update manual API V.7
- 2] Menyiapkan manual operasional modul keuangan yang telah disesuaikan dengan semua jenis layanan yang akan diintegrasikan

2. Bulan Februari

- 1] Mengikuti sosialisasi update kebutuhan data integrasi SIPPT BSKJI
- 2] Penyesuaian update data sesuai dengan manual API V.8
- 3] Penyesuaian modul keuangan dengan update pengkategorian input data keuangan sesuai jenis layanan dan sub layanan berdasarkan pedoman pengklasifian jenis layanan integrasi BSKJI
- 4] Menganalisis data transaksi keuangan yang telah sesuai jenis layanan dan sub layanan untuk penyiapan integrasi data SIPPT
- 5] Koordinasi dengan pokja keuangan terkait operasional modul keuangan untuk penyesuaian layanan dan sub layanan

3. Bulan Maret

- 1] Melakukan uji coba pengiriman data integrasi ke server development SIPPT
- 2] Melakukan evaluasi hasil uji coba integrasi data untuk layanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi

3] Melakukan pengiriman data integrasi ke server produksi SIPPT untuk semua layanan pada transaksi penerimaan keuangan di bulan Januari, Februari dan Maret 2026

4] Memverifikasi data hasil integrasi data layanan melalui dashboard SIPPT dan dashboard pimpinan BSKJI

**b. Kendala**

- ✓ Perbedaan dalam pengambilan data transaksi dimana integrasi data SIPPT menggunakan basis data kuitansi pembayaran SINDI sedangkan untuk pelaporan penerimaan menggunakan basis data rekening koran dari Bank BNI yang terupdate yang mempunyai kerentanan dalam perbedaan pengklasifikasian layanan dan sub layanan.
- ✓ Perlu penambahan input pengesahan transaksi penerimaan pada modul keuangan SINDI untuk melengkapi kebutuhan data integrasi SIPPT
- ✓ Keterbatasan layanan yang terakomodir dalam aplikasi SINDI (Pengujian dan Kalibrasi) membutuhkan update modul untuk mengakomodir kebutuhan data proses transaksi dari awal sampai akhir.

**c. Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

1] Pembaruan Standar API:

Berhasil melakukan migrasi standar teknis dari API V.7 ke V.8 sistem integrasi data SIPPT BSKJI terbaru.

2] Finalisasi Manual Operasional:

Menuntaskan penyusunan panduan modul keuangan yang selaras dengan seluruh jenis layanan.

3] Sinergi Pokja Keuangan:

Memperkuat koordinasi dengan Pokja Keuangan dalam pengkategorian layanan dan sub-layanan, memastikan data transaksi sudah bersih dan siap integrasi.

4] Uji Coba Sistem Berhasil:

Menyelesaikan tahap trial di Server Development dengan hasil sukses pada layanan utama (pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi).

5] Integrasi Data Produksi:

Tuntas mengirimkan data penerimaan semua layanan periode Januari–Maret 2026 ke Server Produksi, sehingga realisasi anggaran dapat dipantau langsung melalui Dashboard Pimpinan

Tindak lanjutnya adalah

1] Sinkronisasi Data (Mapping) :

Membuat fitur auto-mapping di sistem untuk mencocokkan data kuitansi SINDI dengan data rekening koran BNI agar tidak terjadi selisih pengklasifikasian atau mengaktifkan fitur Virtual Account dalam kemudahan transaksi layanan

2] Update Modul Keuangan :

Menambahkan fitur Pengesahan Transaksi di aplikasi SINDI sebagai syarat wajib sebelum data dikirim ke API SIPPT.

3] Perluasan Modul Layanan :

Melakukan pengembangan fitur end-to-end (awal hingga akhir) untuk seluruh jenis layanan di SINDI, agar semua transaksi terdata otomatis tanpa perlu input manual tambahan.

## **2) Indikator Kinerja Sasaran 4.2. : Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Tingkat Penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan, serta infrastruktur pendukung SPBE di suatu instansi.

Cara menghitungnya adalah memberikan penilaian pada Kertas Kerja Perhitungan Indikator Tingkat Penerapan SPBE, dengan indikator yang dinilai meliputi Tata Kelola SPBE (11 sub indikator), Manajemen SPBE (8 sub indikator), Layanan SPBE (4 sub indikator).

Dari setiap sub indikator yang berjumlah total 23 tersebut, perlu dibuktikan dengan data dukung sesuai kriteria. Masing-masing unit organisasi mengupload data dukung pada Lembar Kerja yang disediakan oleh Pusdatin.

### **a) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 20% dari target 78% dengan capaian 25,64 %. Hasil nilai sesuai perhitungan mandiri dari Kelompok Kerja Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25% dengan realisasi 25%.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

- 1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan.
- 2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan.
- 3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

#### 1. Bulan Januari

- 1] Melakukan pemetaan seluruh infrastruktur SPBE BBSPJPPI (SINDI, UDARAKU, WEBSITE, IOT) serta menginventarisasi aset TIK untuk kebutuhan penyusunan usulan anggaran SPBE
- 2] Menganalisis semua kebutuhan tata kelola SPBE sebagai bahan penyusunan dokumen usulan anggaran SPBE 2027
- 3] Penyusunan dokumen Usulan Rencana Anggaran SPBE BBSPJPPI Tahun 2027 serta penyampaian ke Pusdatin Kemenperin

#### 2. Bulan Februari

- 1] Mengikuti rapat koordinasi terkait review pelaksanaan kegiatan SPBE 2025 dan program kerja kegiatan SPBE 2026 oleh Pusdatin Kemenperin
- 2] Melakukan koordinasi dengan pokja program terkait rekomposisi anggaran belanja pengembangan aplikasi sesuai dengan prioritas dan ketersediaan anggaran
- 3] Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen clearance 2026 dan prioritas pengembangan aplikasi

#### 3. Bulan Maret

- 1] Konsultasi dengan Pusdatin terkait rencana pengembangan aplikasi sesuai dengan standar penyusunan dokumen teknis
- 2] Menjadwalkan kegiatan konsultasi pengembangan aplikasi pada tanggal 28 April 2026 ke Pusdatin Kemenperin
- 3] Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan dokumen teknis pengembangan aplikasi

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b) Kendala**

Keterbatasan penjadwalan konsultasi pengembangan aplikasi oleh Pusdatin membutuhkan penyiapan dokumentasi teknis lebih teliti dan lengkap untuk mengoptimalkan proses review

**c) Rekomendasi**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Perencanaan Anggaran 2027: Sedang melakukan inventarisasi aset (SINDI, UDARAKU, Website, IoT) sebagai basis usulan anggaran SPBE 2027 ke Pusdatin.
- Penyelarasan Program: Telah melakukan koordinasi review SPBE 2025 dan perencanaan 2026 bersama Pusdatin.
- Optimalisasi Anggaran: Selesai melakukan rekomposisi anggaran belanja aplikasi 2026 agar tetap sesuai dengan dokumen clearance dan pagu yang tersedia.
- Persiapan Teknis: Intensifikasi pengumpulan data teknis aplikasi sebagai bahan konsultasi.
- Target Terdekat: Konsultasi teknis dengan Pusdatin Kemenperin telah dijadwalkan pada 28 April 2026 untuk standarisasi dokumen.

Tindak lanjut triwulan selanjutnya adalah menyelesaikan seluruh draf dokumen teknis maksimal satu minggu sebelum jadwal konsultasi agar meminimalkan revisi.

**3) Indikator Kinerja Sasaran 4.3. : Indeks Pelayanan Publik (IPP)**

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 belum ada realisasi dari indikator kinerja ini. Dimana penilaian self assessment dilakukan pada akhir tahun anggaran. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 30 % dengan realisasi 30 %.

Adapun rencana kegiatan triwulan I adalah

- 1] Mengevaluasi/mereviu nilai IPP Tahun sebelumnya.
- 2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDIi.
- 3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Baner/leaflet, website) secara berkala.
- 4] Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan
- 5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat.
- 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kemenperin

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut adalah

- 1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya
- 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar
- 3) Memutakhirkan konten SIPPN dan website
- 4) Penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPJPPI (elektronik dan non elektronik)
- 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ informasi kepada pelanggan

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Tidak ada kendala

**c. Rekomendasi**

Tindak lanjutnya adalah menyampaikan kembali kendala akses ke BSKJI untuk akun SP4N Lapor dan SIPPN.

## F. Sasaran Kegiatan 5 : Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien

Tabel 19. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 5 Triwulan I TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62 Persen	Belum ada jadwal audit kinerja	-	15	15	1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	B 1-3 : 1] Penyampaian Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 1/BBSPJPPI.1/PR/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2] Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2026 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok kerja 3] Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2025 dengan Tim SPI
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal	73 nilai	Belum ada jadwal penilaian arsip	-	25	25	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung	B1-3 : 1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi

		(Unit Kearsipan)						dan pengisian form pengawasan internal.	<p>sepanjang TW I, yg meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Penciptaan : 63 surat masuk &amp; 277 surat keluar;</li> <li>· Pemeliharaan: 277 arsip aktif &amp; 666 arsip inaktif; alih media: 9 arsip statis</li> <li>· Penggunaan 6 pelayanan; &amp;</li> <li>· Penyusutan: 369 arsip dipindahkan &amp; 203 arsip usul musnah.</li> </ul> <p>2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal dg melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Koordinasi bersama Biro Umum sbg pembina, dg ketua tim pokja maupun sesama tim arsip.</li> <li>· Melakukan Peningkatan SDM Kearsipan dg mengikuti Pembinaan SDM kearsipan secara online.</li> </ul>
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	---

Pada Sasaran Kegiatan 5 terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

**1) Indikator Kinerja Sasaran 5.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker**

Pengawasan internal melalui pelaksanaan audit kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal setiap tahun sebagai wujud kontrol dan pendampingan atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahunnya hasil pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan dimaksud.

Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus :

$$A = \frac{(B+C)}{2}$$

A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)

C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian Kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 belum ada realisasi dari indikator kinerja ini dikarenakan belum terdapat jadwal audit dari Inspektorat Jenderal III.. Sedangkan Pada target fisik dari indikator ini 15 % dengan realisasi 15 %. Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I adalah:

- 1] Koordinasi penyusunan dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.
- 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III.

Realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

Bulan Januari

- 1] Penyampaian Nota Dinas Kepala BBSPJPPI Nomor 1/BBSPJPPI.1/PR/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan Intern
- 2] Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2026 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok kerja
- 3] Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2025 dengan Tim SPI.

Bulan Februari

1. Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2025 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok kerja dan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2025 oleh Tim SPI
2. Pengajuan pengesahan Laporan Akhir Kegiatan 2025 ke Kepala Balai selaku KPA.

Bulan Maret

- 1] Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPJPPI TA 2025 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok kerja dan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2025 oleh Tim SPI
- 2] Pengajuan pengesahan Laporan Akhir Kegiatan 2025 ke Kepala Balai selaku KPA
- 3] Penyiapan dokumen kelengkapan audit kinerja tahun 2025 untuk aspek perencanaan dan penganggaran.

Dari data diatas, berdasarkan perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Penyiapan dokumen kelengkapan audit kinerja tahun 2025 untuk aspek perencanaan dan penganggaran

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah belum terdapat informasi terkait pelaksanaan audit kinerja satker BBSPJPPI tahun 2025 dari pihak Inspektorat III.

Rencana perbaikan di triwulan selanjutnya adalah memonitoring penyusunan dan penyampaian laporan akhir kegiatan dan memastikan laporan akhir kegiatan tersedia sebelum pelaksanaan audit kinerja oleh Tim Inspektorat Jenderal.

## 2) Indikator Kinerja Sasaran 5.2 : Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan).

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Tiap unit kerja dilakukan penilaian sesuai dengan kategori unitnya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.

Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Pada Triwulan I TA 2026 belum ada realisasi dari indikator kinerja ini dikarenakan belum terdapat jadwal penilaian kearsipan. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi capaian sebesar 25 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I.

2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan sampai triwulan I yaitu:

#### 1. Bulan Januari

- Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I, yg meliputi

- Penciptaan : 119 surat masuk & 603 surat keluar;
- Pemeliharaan: 217 arsip aktif & 885 arsip inaktif; alih media: 8 arsip statis
- Penggunaan 6 pelayanan; &
- Penyusutan: 385 arsip dipindahkan & 202 arsip usul musnah.
- Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal dg melakukan:
  - Koordinasi bersama Biro Umum sbg pembina, dg ketua tim pokja maupun sesama tim arsip.
  - Melakukan Peningkatan SDM Kearsipan dg mengikuti Pembinaan SDM kearsipan secara online.

## 2. Bulan Februari

- Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I, yg meliputi
  - Penciptaan : 121 surat masuk & 429 surat keluar;
  - Pemeliharaan: 233 arsip aktif & 665 arsip inaktif; alih media: 17 arsip statis
  - Penggunaan 3 pelayanan; &
  - Penyusutan: 353 arsip dipindahkan & 203 arsip usul musnah.
- Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal dg melakukan:
  - Koordinasi bersama Biro Umum sbg pembina, dg ketua tim pokja maupun sesama tim arsip.
  - Melakukan Peningkatan SDM Kearsipan dg mengikuti Pembinaan SDM kearsipan secara online.

## 3. Bulan Maret

- Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I, yg meliputi
  - Penciptaan : 63 surat masuk & 277 surat keluar;
  - Pemeliharaan: 277 arsip aktif & 666 arsip inaktif; alih media: 9 arsip statis

- Penggunaan 6 pelayanan; &
- Penyusutan: 369 arsip dipindahkan & 203 arsip usul musnah.
- Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal dg melakukan:
  - Koordinasi bersama Biro Umum sbg pembina, dg ketua tim pokja maupun sesama tim arsip.
  - Melakukan Peningkatan SDM Kearsipan dg mengikuti Pembinaan SDM kearsipan secara online.

Perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

- 1] Ketergantungan pada sistem intranet/intranew masih sangat kuat, sehingga pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum optimal.
- 2] Keterbatasan SDM kearsipan baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, terutama dalam pengelolaan arsip digital dan alih media.
- 3] Koordinasi lintas unit pengolah belum optimal.
- 4] Masih diperlukan penguatan komitmen unit kerja dalam tertib arsip dan penyampaian data dukung.
- 5] Keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung digitalisasi.

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- 1] Tata kelola arsip fisik dan digital (Aplikasi SRIKANDI) telah dilaksanakan secara konsisten setiap bulan, namun fluktuasi jumlah penciptaan arsip (terutama surat keluar dan penggunaan SRIKANDI) menunjukkan belum optimalnya konsistensi penggunaan sistem digital.
- 2] Penggunaan layanan arsip relatif masih rendah dan tidak stabil.
- 3] Alih media arsip statis masih terbatas jumlahnya, sehingga digitalisasi belum maksimal.

Rencana perbaikan untuk tahun selanjutnya adalah koordinasi ke Biro Umum sebagai UK 1 terkait mengenai kearsipan serta menajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI.

Tindak lanjut pada triwulan selanjutnya adalah

1.Mengintegrasikan pengelolaan arsip ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk transparansi dan kecepatan akses

2.Menyelenggarakan pelatihan teknis kearsipan secara berkala bagi pengelola arsip.

### G. Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Tabel 20. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 6 triwulan I TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45 nilai	84,1 nilai	105,85	30	30	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen	B1-B3 : 1] Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan 2] Penyiapan dokumen pendukung penilaian implementasi SAKIP 2025 pada satker 3] Evaluasi implementasi SAKIP pada satker BBSPJPPI telah dilaksanakan pada 3 Maret 2026 secara offline dengan Tim Evaluator Inspektorat III 4] Penyusunan draft laporan PP 39

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
									Triwulan I 2026.
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,40 nilai	59,20 nilai	63,38 %	25	25	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontaktual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	B1-3: -Telah dibuat rencana penarikan dana bulanan. -monitoring realisasi belanja. Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan tiap triwulan. - Pengajuan revisi kewenangan KPA terkait rekomposisi blokir pada aplikasi SAKTI untuk mendorong realisasi penyerapan anggaran
		3.Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75 nilai	Belum ada jadwal penilaiannya	-	25	25	1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Unadited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi	B1-B3 : 1) Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 (unaudited) 2) Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan Audit KAP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Fisik (%)		Kegiatan Sampai Triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
								SAKTI-SPAN bulan Desember tahun sebelumnya 5) Mendukung pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahunan	

Pada Sasaran Kegiatan 6 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

**1) Indikator Kinerja Sasaran 6.1 : Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker**

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capainya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 84,10 dari target 79,45 nilai dengan capaian 105,85%. Hasil nilai berdasarkan Nota Dinas Inspektur III Nomor 62/IJ-IND.4/PW/III/2026 tanggal 13 Maret 2026. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 30 % dengan realisasi capaian sebesar 30 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- 1] Penyusunan dokumen Tapkin
- 2] Penyusunan dokumen Renkin
- 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I)
- 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021
- 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu :

#### Bulan Januari

- 1] Penyusunan draft Perkin 2026 sesuai dengan indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra BBSPJPPI 2025-2029
- 2] Draft Perkin BBSPJPPI 2026 telah disampaikan dan dikonsultasikan ke Sekretariat BSKJI serta telah mendapatkan persetujuan/ ditandatangani Kepala BSKJI
- 3] Penyusunan dokumen Renkin TA 2027 satker BBSPJPPI
- 4] Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan
- 5] Penyusunan dan review Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BBSPJPPI Tahun 2025. Dokumen LAK TA 2025 telah disampaikan sesuai ND KaBBSPJPPI Nomor 25/BBSPJPPI.1/PR/I/2026

#### Bulan Februari

- 1] Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan
- 2] Pelaksanaan rapat persiapan evaluasi implementasi SAKIP TA 2025 di lingkungan BSKJI pada 12 Februari 2026
- 3] Penyiapan dokumen pendukung penilaian implementasi SAKIP 2025 pada satker BBSPJPPI.

#### Bulan Maret

- 1] Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan
- 2] Penyiapan dokumen pendukung penilaian implementasi SAKIP 2025 pada satker BBSPJPPI
- 3] Evaluasi implementasi SAKIP pada satker BBSPJPPI telah dilaksanakan pada 3 Maret 2026 secara offline dengan Tim Evaluator Inspektorat III

4] Penyusunan draft laporan PP 39 Triwulan I 2026.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Tidak ada kendala

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah

1] Peyusunan dan penyampaian dokumen akuntabilitas kinerja periode Tw I 2026 telah dilakukan secara tepat waktu

2] Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP 2025 oleh Tim Inspektorat III, capaian nilai SAKIP pada satker BBSPJPPI telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perkin

Tindak lanjutnya triwulan selanjutnya adalah

1] Penyusunan dan penyampaian Laporan PP 39 Triwulan I 2026 secara tepat waktu

2] Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2025.

**2) Indikator Kinerja Sasaran 6.2 : Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Satker.**

Nilai minimal IKPA merupakan ambang batas terendah yang harus dicapai oleh satuan kerja dalam mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. IKPA sendiri digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran berbasis aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai minimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran mendukung pencapaian output yang optimal serta menghindari potensi penyimpangan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan negara.

Tata cara perhitungan IKPA mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 atau peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 59,20 nilai dari target 93,40 nilai dengan capaian 63,38% (Data diambil dari MyIntress). Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi capaian sebesar 25 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- 1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA
- 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja
- 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I
- 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontaktual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu
- 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

#### 1. Bulan Januari

- Koordinasi antara Tim Pokja Program dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I 2026.

#### 2. Bulan Februari

- Pengajuan usulan revisi pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I 2026 melalui aplikasi SAKTI

#### 3. Bulan Maret

- Pengajuan revisi kewenangan KPA terkait rekomposisi blokir pada aplikasi SAKTI untuk mendorong realisasi penyerapan anggaran

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

#### **b. Kendala**

Data rencana penarikan dana pada halaman III DIPA BBSPJPPI tidak terupdate dikarenakan proses pengesahan DIPA melampaui batas waktu revisi pemutakhiran hal III DIPA Tw I 2026.

Hal ini disebabkan karena pengajuan revisi pemutakhiran hal III DIPA dilakukan bersamaan dengan revisi realokasi anggaran di tingkat Kementerian yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Untuk mendorong capaian nilai IKPA pada aspek kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan usulan revisi.

Tindak lanjutnya triwulan selanjutnya adalah :

- Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II 2026
- Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Tw II 2026 di awal bulan sebelum batas akhir penyampaian revisi.

**3) Indikator Kinerja Sasaran 6.3 : Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan**

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.

Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.

<b>Tingkat Satuan Kerja</b> <b>Komponen Penilaian</b>	<b>Bobot (%)</b>
1. Kesesuaian dengan SAP	24%
2. Kecukupan Informasi	53,5%
3. Efektivitas Pengendalian Internal	9%
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	13,5%
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 belum terdapat realisasi dari indikator kinerja karena belum ada jadwal penilaian. Sedangkan target fisik dari indikator ini adalah 25 % dengan realisasi capaian sebesar 25 %.

Adapun rencana aksi kegiatan pada Triwulan I meliputi:

- Menyusun laporan keuangan tahunan (Unadited)

- Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni
- Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU
- Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Desember tahun sebelumnya
- Mendukung pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahunan

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut yaitu:

- 1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Unadited)
- 2) Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan Audit KAP.

Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

Terdapat kesalahan pencatatan akun, yaitu belanja meja stand pameran *portable* dengan nominal Rp. 1.000.000. Seharusnya masuk Akun (537112) Belanja Modal. Namun dalam LK masuk ke akun (525162) Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pengajuan revisi kewenangan KPA terkait rekomposisi blokir pada aplikasi SAKTI untuk mendorong realisasi penyerapan anggaran.

Tindak lanjut nya adalah

- Pada Laporan Keuangan sudah tidak bisa diperbaiki kesalahan pencatatan akun dikarenakan sudah tahun 2025. Sehingga diberikan penjelasan di Laporan Keuangan terkait kesalahan pencatatan tersebut.
- Untuk selanjutnya melakukan pembelian barang ekstrakomptabel sesuai dengan batas kapitalisasi yang telah ditentukan yaitu tidak melebihi dari Rp. 1.000.000,-.

**H. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri**

Tabel 21. Pengukuran Realisasi Sasaran Kegiatan 7 triwulan I TA 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	81 %	99,78 %	123,19%	30	30	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN	B1-1 : 1.Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2.Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3TKDN sampai TW I dr aplikasi SAKTI sebesar 99,78%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (%)		Kegiatan Sampai triwulan I	
						Target	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	3	4		4	5	6	7	8
								sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging PDN dalam aplikasi e-Mon APBN	

Pada Sasaran Kegiatan 7 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran yakni:

**1) Indikator Kinerja Sasaran 7.1 : Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah**

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari pemanfaatan anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perhitungan penggunaan produk dalam negeri didasarkan atas realisasi anggaran pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja Pemerintah. Pemakaian akun belanja yang disepakati bersama ada 14 akun meliputi akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 5251112, 5251113, dan 5251153.

Perhitungan nilai realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri (  $R_{P3DN}$  ) didapat dari Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih dibagi total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$$

Ket:

RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin

RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN

TotRA: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun terpilih.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja**

Pada Triwulan I TA 2026 realisasi dari indikator kinerja ini adalah 99,78 % dari target 81 persen dengan capaian 123,19 %. Sedangkan target fisik sebesar 30% dengan realisasi 30%.

Adapun rencana kegiatan Triwulan I adalah sebagai berikut:

- 1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan
- 2] Pengisian aplikasi P3DN
- 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%
- 4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan
- 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN
- 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan *tagging* PDN dalam aplikasi e-Mon APBN

Adapun capaian realisasi fisik dari kegiatan tersebut sd Triwulan I yaitu:

- Melakukan pengadaan yang merupakan PDN, seperti : belanja barang, konsumsi rapat, pembayaran listrik, pengujian ke pihak lain, kalibrasi, dan perjalanan dinas
- Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%

- Mengutamakan pembelian produk dalam negeri untuk Kebutuhan Dasar Perkantoran.
- Melakukan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan mengutamakan bahan material produksi dalam negeri

Berdasarkan monitoring capaian realisasi TKDN BBSPJPI Triwulan I 2026 berdasarkan data *tagging* realisasi TKDN pada akun terpilih diperoleh data capaian sebesar 99,78 %.

Tabel 22. Rekapitulasi TKDN dari SAKTI

Total Nilai TKDN	Rp. 2.082.351.242,-
Total Nilai Pagu	Rp. 2.086.905.030,-
Rata-rata Nilai % TKDN	99,78 %

Dari data di atas, perbandingan realisasi dan target maka berhasil dilaksanakan.

**b. Kendala**

1. Penggunaan langganan lisensi aplikasi video conference yang belum didapatkan dari layanan dalam negeri.
2. Diberlakukan blokir anggaran belanja yang berpotensi memiliki nilai TKDN.
3. Beberapa belanja barang, khususnya untuk bahan kimia, belanja modal (mesin/peralatan) masih didapatkan dari impor.

**c. Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- 1] Telah memetakan potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa.
- 2] Telah diajukan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25%, khususnya belanja modal, sehingga menunggu persetujuan tersebut untuk mulai proses pengadaan tersebut.
- 3] Telah melakukan pengadaan dari akun yang telah ditentukan dengan mengutamakan produk yang memiliki sertifikat TKDN atau PDN.

Tindak lanjut triwulan selanjutnya adalah

- Melakukan refocusing dari anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.
- Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN

melalui website P4DN.

- Tetap melakukan pengadaan dari akun yang telah ditentukan dengan mengutamakan produk yang memiliki sertifikat TKDN atau PDN.

### 3.1.2 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai DIPA BBSPJPI TA 2026 sampai dengan Triwulan I 2026, capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan pada Triwulan I TA. 2026 dengan mengacu pada aplikasi SMART Kemenkeu. Capaian realisasi keuangan berdasar pagu efektif sebesar 22,77 % sedangkan target capaian realisasi keuangan satker sesuai usulan masing-masing satker sebesar 21,39 %. Sehingga realisasi anggaran mencapai target. Untuk target fisik yang ditetapkan BSKJI adalah 5% lebih tinggi dari usulan realisasi keuangan masing masing satker yaitu 26,39% dengan capaian realisasi fisik TW I sebesar 25,28 %. Maka untuk realisasi fisik tidak sesuai target berdasarkan Nota Dinas BSKJI tetapi melebihi dari target realisasi fisik yang tertuang dalam rencana aksi 2026 Triwulan I BBSPJPI. Secara lebih jelas capaian realisasi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana berikut :

#### a. Kegiatan I: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri

##### a) Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 23. Kegiatan I realisasi fisik dan keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan TW I	TVR O	RVR O	Progres	Januari		Februari		Maret	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	101 - Sosialisasi dan Diseminasi	46.933.000	-	190 Orang	-	6%	0	2%	0	2%	0	2%
	001 - Jasa pelayanan teknis pengujian Pencegahan Pencemaran	5.835.674.000	452.030.918 (7,75%)	485 industri	136 industri	24%	82	8%	36	8%	18	8%

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan TW I	TVR O	RVR O	Progres	Januari		Februari		Maret	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
BAD Pelayanan publik kepada industri Prasarana Internal	Industri											
	002 - Jasa penyelenggara uji profisiensi	100.484.000	-	15 industri	12 industri	24%	3	8%	7	8%	2	8%
	003 - Jasa pelayanan produsen bahan acuan	43.615.000	-	5 industri	-	-	0	0	0	0	0	0
	004 - Jasa pelayanan teknis kalibrasi Pencegahan Pencemaran Industri	1.371.451.000	870.000 (0,06%)	40 industri	14 industri	24%	9	8%	4	8%	1	8%
	005 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi Pencegahan Pencemaran Industri	476.203.000	56.607.080 (11,89%)	220 industri	72 industri	24%	34	8%	34	8%	4	8%
	055 - Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri Pencegahan Pencemaran Industri	181.890.000	2.220.000 (1,22%)	8 industri	2 industri	24%	1	8%	1	8%	-	8%
	057 - Jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Pencegahan Pencemaran Industri	240.620.000	6.080.000 (2,53%)	9 industri	11 Industri	24%	9	8%	0	8%	2	8%
	Jasa pelayanan verifikasi	78.912.000	4.862.454 (6,16%)	16 industri	7 industri	24%	2	8%	3	8%	2	8%
	096 - Jasa Pelayanan pemeriksa dan pengujian produk	34.038.000	-	25 industri	1 Industri	24%	0	8%	1	8%	0	8%

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan TW I	TVR O	RVR O	Progres	Januari		Februari		Maret	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
	halal											
CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	001 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan Pencegahan Pencemaran Industri	3.211.777.000	-	44 unit	-	-	0	0	0	0	0	0
Total	Target Keuangan usulan ke BSKJI 21,39 %	Rp. 11.621.597.000	Realisasi Rp. 522.670.452,- ( 4,5% )									

( Sumber : Aplikasi SAKTI)

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang didalamnya mencakup pelaksanaan/operasional pemberian jasa layanan kepada masyarakat khususnya industri meliputi penyelenggaraan jasa pelayanan teknis pengujian, pelayanan teknis kalibrasi, pelayanan teknis sertifikasi, pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis, pelayanan verifikasi industri, pelayanan uji profisiensi, pelayanan optimasi pemanfaatan teknologi, produsen bahan acuan, pemeriksaan produk halal, pemeliharaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian berupa pelaksanaan kegiatan akreditasi/surveillance/reakreditasi, pengadaan peralatan fasilitas Laboratorium/workshop/layanan, Sosialisasi dan diseminasi layanan teknis serta publikasi layanan jasa teknis.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan/operasional layanan seperti diantaranya belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan layanan (sampling, audit sertifikasi, supervisi kerjasama Optek, bimbingan dan pendampingan teknis dan verifikasi industri), belanja jasa (pemeliharaan akreditasi lembaga Penilaian Kesesuaian, biaya kalibrasi peralatan, pengujian Subkon, sewa kendaraan dalam rangka mobilisasi peralatan untuk sampling, transport Limbah B3) serta belanja barang dan barang persediaan (pembelian bahan kimia dan bahan penolong, pengadaan peralatan gelas, perlengkapan sampling, penggantian sparepart peralatan dll).

Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri terdiri dari 3 KRO yaitu AEF (Sosialisasi dan Diseminasi), BAD (Pelayanan Publik kepada industri) dan CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan).

- KRO AEF (Sosialisasi dan Diseminasi)

Belum ada realisasi kegiatan di Triwulan I

- KRO BAD (Pelayanan Publik kepada industri)

Pada KRO Pelayanan Publik kepada industri terdiri dari 9 RO. Sampai Triwulan I total realisasi keuangan sebesar 6,25 %, tidak mencapai target keuangan yg diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi KRO ini antara lain :

1. Perjalanan dinas semua jasa layanan balai.
2. Pengadaan bahan kimia dan bahan penolong.
3. Pembayaran sewa peralatan GCMS
4. Perjalanan dinas instruktur dalam rangka bimbingan dan pendampingan teknis.

- CAH (Sarana Bidang Industri dan Perdagangan)

Pada KRO Sarana Bidang Industri dan Perdagangan terdiri dari satu RO. Dimana target pengadaan 44 unit dan belum ada realisasi keuangannya.

Sampai Triwulan I Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri realisasi keuangan sebesar 4,50 % tidak mencapai target keuangan yang diusulkan satker ke eselon I.

#### **b) Kendala**

1. KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi

- Pada triwulan I belum tersedia jadwal pelaksanaan pameran dengan tema yang sesuai dengan kompetensi dan lingkup layanan BBSPJPPI.

2. KRO 6077.CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan

- Proses belanja modal terkait sarpras layanan terkendala adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026. Penjadwalan ulang pelaksanaan belanja modal sarpras layanan sebagian menunggu proses pengesahan revisi rekomposisi blokir anggaran yang baru diperoleh pada akhir periode Triwulan I 2026.

**c) Tindak Lanjut**

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

- Beberapa rencana pelaksanaan belanja modal sarpras layanan memerlukan penyesuaian/ penjadwalan ulang terkait proses pengadaan dikarenakan menunggu ketersediaan anggaran yang baru diperoleh melalui proses revisi rekomposisi blokir.

Rencana perbaikan di Triwulan selanjutnya adalah :

- Pencarian informasi terkait jadwal pelaksanaan pameran dengan tema dan target pasar yang sesuai dengan lingkup layanan BBSPJPI.
- Bersamaan dengan menunggu terbitnya surat izin impor, akan dilakukan persiapan proses pengadaan sesuai jadwal yang telah disesuaikan diantaranya dengan melakukan penyiapan dokumen pengadaan dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran mengingat sumber anggaran menggunakan anggaran PNB/BLU.

**b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri**

**a. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja**

Capaian realisasi fisik dan keuangan pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24 : Kegiatan II Realisasi Fisik dan Keuangan

KRO	RO	Pagu Efektif (Rp)	% Realisasi Keuangan s/d Desember	TVRO	RVRO	Progres	Januari		Februari		Maret	
							RV RO	Progres	RV RO	Progres	RV RO	Progres
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001- Pengadaan perangkat TIK	166.432.000	-	9 Unit	-	0 %	0	0	0	0	0	0
EBA Layanan Dukung	958 Layanan Hubungan	246.156.000	-	1 layanan	- Capaian di akhir	24%	0	8%	0	8%	1	8%

an Manaje men Internal	Masyara kat dan Informa si (Layana n)				tahun							
	962 - Layanan Umum	182.262.0 00	8.742.80 0 (4,80%)	1 layana n	- Capai an di akhir tahun	24%	0	8%	0	8%	1	8%
	994 - Layanan Perkant oran	23.636.32 3.000	7.298.83 4.311 (30,88%)	1 layana n	- Capai an di akhir tahun	24%	0	8%	0	8%	1	8%
EBB Layana n Sarana dan Prasara na Internal	951 - Layanan Sarana Internal	1.057.121. 000	652.000. 000 (61,68%)	61 unit	1 unit	24%	0	8%	1	8%	0	8%
EBC Layana n	954 - Layanan Manaje men SDM	51.338.00 0	5.178.00 0 (10,09%)	104 layana n	24 layana n	24%	8	8%	8	8%	8	8%
	Manaje men SDM Internal	996 - Layanan Pendi kan dan Pelati ha n	182.621.0 00	-	1 layana n	- Capai an di akhir tahun  -	24%	-	8%	-	8%	-
EBD Layana n Manaje men Kinerja Internal Industri	952 - Layanan Kinerja Satker	120.600.0 00	4.680.34 5 (3,88%)	1 layana n	- Capai an di akhir tahun	24%	-	8%	-	8%	-	8%
	953 - Layanan Pemant auan dan	13.816.00 0	155.750 (1,13%)	5 doku men	2 doku men	24%	2	8%	-	8%	-	8%

	Evaluasi											
	961 - Layanan Reformasi Kinerja	18.452.000	-	2 dokumen		24%	-	8%	-	8%	-	8%
Total	Target Keuangan 21,39 %	25.675.121.000	7.969.591.206 (31,04%)									

( Sumber Aplikasi SAKTI )

Sampai dengan Triwulan I total realisasi keuangan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri sebesar 31,04 % di atas dari target keuangan usulan satker ke eselon I.

Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan kegiatan dalam lingkup Program Dukungan Manajemen yang didalamnya mencakup pengadaan perangkat TIK, pelaksanaan layanan operasional perkantoran dan pemeliharaan sarana prasarana, perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, pengelolaan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi serta pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM.

Pengalokasian anggaran pada Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja keperluan perkantoran, belanja gaji dan honor (operasional satuan kerja, honor output kegiatan, honorarium karyawan kontrak) belanja barang persediaan (pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga perkantoran), biaya langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet), perjalanan dinas (perjadin pimpinan), belanja pemeliharaan sarpras, belanja jasa (pemeliharaan SMM balai, maintenance jaringan, biaya pelatihan teknis SDM) serta belanja modal (pengadaan sarpras perkantoran, pengembangan sistem informasi, pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan ).

Pada kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri terdapat 5 (lima) Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang terdiri dari:

1. KRO 6042.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - Belum ada realisasi keuangan pada KRO ini

2. KRO 6042.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari tiga RO.

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan sebesar 30,37 % mencapai sasaran yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pimpinan
- Pembayaran biaya langgan listrik, biaya medical check up untuk petugas layanan, biaya langgan air PDAM, pembelian gallon air minum dan pembelian obat-obatan untuk kebutuhan poliklinik.
- Pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan ASN.
- Pembayaran jasa outsourcing tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan pengemudi
- Pengadaan bahan makanan minuman penambah daya tahan tubuh.
- Pembayaran belanja perawatan aplikasi dan jaringan IT.
- Pembayaran operasional dan pemeliharaan kantor.

3. KRO 6042.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Pada KRO Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari satu RO yaitu layanan sarana internal. Dimana target 61 unit dan terrealisasi 1 unit

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan sebesar 61,68%, telah mencapai sasaran.yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah realisasi :

- Pengadaan 1 buah mobil operasional pimpinan

4. KRO 6042.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Pada KRO Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari dua RO.

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan sebesar 2,21%, tidak mencapai sasaran yang diusulkan satker ke eselon I..

Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

5. KRO 6042.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari 3 RO.

Sampai Triwulan I total realisasi keuangan sebesar 3,16% , tidak mencapai sasaran

yang diusulkan satker ke eselon I.

Realisasi fisik dari kegiatan ini secara umum adalah

- Percetakan dokumen perencanaan dan penganggaran
- Percetakan dokumen dan penjilidan laporan akuntabilitas kinerja.
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi workshop penyusunan Laporan Keuangan dan BMN.

**b. Kendala**

Proses belanja modal terkait sarpras perkantoran serta belanja peningkatan kompetensi SDM internal terkendala adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026.

Penjadwalan ulang pelaksanaan belanja modal sarpras perkantoran serta pelatihan teknis SDM sebagian menunggu proses pengesahan revisi rekomposisi blokir anggaran yang baru diperoleh pada akhir periode Triwulan I 2026.

**c. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran, direkomendasikan melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional BBSPJPPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antar unit maupun peningkatan intensitas pemakaian guna memperpanjang masa pakai. Sebagai langkah antisipatif, dilakukan pemetaan terhadap barang-barang pengadaan yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negari (TKDN) dan tidak termasuk dalam pemblokiran dengan memanfaatkan data pada portal P4DN. Pengadaan belanja modal tetap dapat dilakukan sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Perindustrian atau Sekretaris Jenderal, guna memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan dan mendukung kelangsungan operasional prioritas BBSPJPPI.

Terkait dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, segera dilakukan realisasi pelaksanaan pelatihan teknis sesuai dengan daftar dan jadwal pelatihan yang telah disusun sesuai alokasi anggaran yang telah tersedia melalui proses revisi rekomposisi blokir.

## 3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

### 3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

- a. Terkait dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai *Net Promoter Score* (NPS) terdapat kendala masih rendahnya partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner (pengisian dan pengembalian kuesioner oleh pelanggan jumlahnya rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar).
- b. Terkait jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri dan jumlah hasil layanan jasa industri terjadi penurunan capaian dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2025.
- c. Terkait indikator kinerja persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) terdapat kendala belum tersedianya sistem untuk memonitoring penyelesaian pekerjaan untuk seluruh layanan. Dimana proses kalkulasi perhitungan masih dilakukan secara manual sehingga rawan terjadi *human error*.
- d. Terkait indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) terdapat kendala perubahan kebijakan penerapan diklat fungsional di masing-masing unit Pembina termasuk di dalamnya ketidakpastian jadwal pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional.
- e. Terkait persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dalam sistem informasi BSKJI terdapat keterbatasan layanan yg terakomodir dalam aplikasi SINDIi ( baru layanan pengujian dan kalibrasi) membutuhkan update modul untuk mengakomodir kebutuhan data proses transaksi dari awal sampai akhir.
- f. Terkait dengan indikator tingkat penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) terdapat kendala keterbatasan penjadwalan konsultasi pengembangan aplikasi oleh Pusdatin. Selain itu membutuhkan penyiapan dokumentasi teknis lebih teliti dan lengkap untuk mengoptimalkan proses review.
- g. Terkait dengan sasaran kegiatan tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) terdapat kendala yaitu ketergantungan pada sistem intranet/intranew sehingga pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum optimal.
- h. Terkait indikator kinerja nilai minimal indikator kinerja pelaksanaan anggaran terdapat kendala dalam proses pemutakhiran hal III DIPA dimana data rencana penarikan dana pada halaman III

DIPA BBSPJPPI Tw I 2026 tidak terupdate dikarenakan proses pengesahan DIPA melampaui batas waktu revisi pemutakhiran hal III DIPA Tw I 2026. Hal ini disebabkan karena pengajuan revisi pemutakhiran hal III DIPA dilakukan bersamaan dengan revisi realokasi anggaran di tingkat Kementerian yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama.

- i. Terkait indikator kinerja penilaian dan analisis laporan keuangan terdapat kendala terkait kesalahan pencatatan akun, yaitu belanja meja stand pameran portable dengan nominal Rp. 1.000.000. Seharusnya tercatat kedalam Akun (537112) Belanja Modal namun dalam LK dicatat menggunakan akun (525162) Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel
- j. Terkait dengan indikator persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah terdapat kendala dimana penggunaan langganan lisensi aplikasi video conference yang belum didapatkan dari layanan dalam negeri dan keterbatasan belanja bahan kimia dan mesin/peralatan laboratorium yang didapatkan dari produsen dalam negeri serta masih adanya blokir anggaran belanja modal yang berpotensi memiliki nilai TKDN.

### 3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Dalam pelaksanaan pelaporan capaian output kegiatan Triwulan I TA 2026 masih terdapat beberapa kendala antara lain :

Sampai akhir Triwulan I TA 2026 pembaharuan aplikasi ALKI dan PP 39 yang dapat menunjukkan capaian target keuangan dan fisik per KRO belum dapat difungsikan, sehingga belum dapat diperoleh data perbandingan antara target dengan capaian/realisasi keuangan maupun fisiknya sebagai bahan dalam penyusunan laporan kinerja. Pada penyusunan laporan Triwulan, data realisasi fisik diperoleh dari manual perhitungan sedangkan realisasi keuangan dari SAKTI.

#### a. Kegiatan I : Pengembangan dan Penyelenggara Jasa Industri (6077)

- Terkait KRO 6077 AEF Sosialisasi dan Diseminasi terdapat kendala belum tersedianya jadwal pelaksanaan pameran dengan tema yang sesuai dengan kompetensi dan lingkup layanan BBSPJPPI.
- Terkait KRO 6077 CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan terdapat kendala proses belanja modal terkait sarpras layanan terkendala adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026. Penjadwalan ulang pelaksanaan belanja modal sarpras layanan sebagian menunggu proses pengesahan revisi rekomposisi blokir anggaran yang baru diperoleh pada akhir periode Triwulan I 2026.

b. Kegiatan II : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (6042)

- Proses belanja modal terkait sarpras perkantoran serta belanja peningkatan kompetensi SDM internal terkendala adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026. Penjadwalan ulang pelaksanaan belanja modal sarpras perkantoran serta pelatihan teknis SDM sebagian menunggu proses pengesahan revisi rekomposisi blokir anggaran yang baru diperoleh pada akhir periode Triwulan I 2026

### 3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT

#### 3.3.1 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kinerja Triwulan I TA 2026 selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan *Net Promoter Score* (NPS), diperlukan strategi intensif dalam menghimpun isian kuesioner. Strategi tersebut antara lain dengan akan dilakukannya *blasting* kuesioner ulang ditengah bulan melalui nomor pemasaran. Selain itu pada sistem SINDI akan dilakukan penyetingan agar pelanggan diwajibkan untuk melakukan pengisian kuesioner sebelum dapat mengunduh LHU.
2. Dalam rangka pencapaian target jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri dan jumlah hasil layanan jasa industri akan dilakukan dengan cara meningkatkan promosi dan kualitas layanan serta memperluas ruang lingkup pengujian yang terakreditasi.
3. Terkait perhitungan persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* akan dilakukan pengulangan verifikasi data kepada masing-masing tim untuk memitigasi terjadinya *human error*.
4. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja IP ASN khususnya terkait pemenuhan kompetensi SDM internal, akan dilakukan melalui pelaksanaan *Inhouse Training* dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi dengan mengoptimalkan anggaran pelatihan hasil rekomposisi blokir. Dalam rangka memonitoring capaian, akan dilakukan simulasi progress perhitungan capaian IP-ASN secara berkala.
5. Terkait persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI akan dilakukan sinkronisasi data (*Mapping*) yaitu membuat fitur *auto-mapping* di sistem untuk mencocokkan data kuitansi SINDI dengan data rekening koran agar tidak terjadi selisih

pengklasifikasian atau mengaktifkan fitur *Virtual Account* yang memberikan kemudahan dalam transaksi layanan.

6. Untuk pemenuhan evaluasi tingkat penerapan SPBE akan dilakukan penyelesaian seluruh draf dokumen teknis maksimal satu minggu sebelum jadwal konsultasi agar meminimalkan revisi.
7. Dalam rangka persiapan penilaian pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) akan dilakukan proses pengintegrasian pengelolaan arsip ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk transparansi dan kecepatan akses. Selain itu akan dijajaki ketersediaan pelatihan/Bimtek terkait kearsipan untuk peningkatan kompetensi SDM arsiparis BBSPJPPI
8. Untuk mendorong capaian nilai IKPA terkait aspek perencanaan penganggaran akan dilakukan koordinasi antara Tim Pokja Program dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II 2026. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Tw II 2026 di awal bulan April sebelum batas akhir penyampaian revisi.
9. Terkait penilaian dan analisis laporan Keuangan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan agar kedepannya melakukan pembelian barang ekstrakomptabel sesuai dengan batas kapitalisasi yang telah ditentukan yaitu tidak melebihi dari Rp. 1.000.000.
10. Untuk mendukung tingkat penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa di tahun berjalan, akan dilakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang telah memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P4DN. Menindaklanjuti hasil rekomposisi blokir anggaran pada anggaran belanja modal, akan segera dilakukan penjadwalan ulang dan proses pengadaan untuk pekerjaan belanja modal yang telah mendapatkan izin dari Menperin/Sekjend.

### 3.3.2 Langkah/Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Rencana perbaikan dalam pelaksanaan kinerja kegiatan Triwulan I TA 2026 sebagai berikut :

- Pencarian informasi terkait jadwal pelaksanaan pameran dengan tema dan target pasar yang sesuai dengan lingkup layanan BBSPJPPI.
- Menindaklanjuti hasil rekomposisi blokir anggaran pada anggaran belanja modal sarpras perkantoran dan belanja peningkatan kompetensi SDM internal, akan segera dilakukan penjadwalan ulang dan proses pengadaan untuk pekerjaan belanja modal sarpras perkantoran. Untuk pelatihan teknis dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan layanan akan dijalankan sesuai jadwal/program yang telah disusun sesuai besaran alokasi anggaran pelatihan yang tersedia hasil proses rekomposisi blokir anggaran.

## BAB. IV

### P E N U T U P

#### 4.1 Realisasi Kegiatan

Berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan sd Triwulan I Tahun 2026, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang telah tercapai yakni "Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker" dengan nilai capaian sebesar 84,10 dari target sebesar 79,45 (capaian realisasi kinerja sebesar 105,8 %). Sementara itu, indikator kinerja lainnya masih belum sepenuhnya mencapai target karena kegiatan masih berjalan hingga akhir tahun 2026.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, pada Triwulan I tahun 2026 telah dilakukan 3 (tiga) kali proses revisi anggaran dengan jumlah pagu pada DIPA sesuai hasil revisi terakhir sebesar Rp 41.630.844.000, terdiri dari anggaran Rupiah Murni senilai Rp 20.278.968.000 dan anggaran PNBP tahun berjalan sebesar Rp. 21.351.876.000,-. Dengan adanya blokir Kode A dalam rangka Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 sebesar Rp. 4.334.126.000, maka besaran pagu efektif yang tersedia sebesar Rp. 37.296.718.000 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp. 20.278.968.000,- dan anggaran PNBP sebesar Rp. 17.017.750.000,-.

Dari sisi kinerja layanan jasa teknis, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan I tercapai sebesar Rp. 4.355.558.365,- atau 20,40% dari target Rp. 21.351.876.000,-. Capaian tersebut berdasarkan pemberian layanan kepada 298 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi dengan keluaran sebanyak 1.637 Hasil Layanan.

Adapun dari aspek kinerja penyerapan anggaran, realisasi anggaran BBSPJPI sd Triwulan I Tahun 2026 mencapai Rp 8.492.261.658,- atau 22,77% dari total pagu efektif anggaran DIPA revisi terakhir. Capaian penyerapan anggaran tersebut melampaui target realisasi keuangan yang telah disampaikan ke BSKJI yang ditetapkan sebesar 21,39%. Namun demikian, untuk capaian realisasi fisik Triwulan I 2026 sebesar 25,28% (sesuai data perhitungan dari capaian % fisik di dalam realisasi rencana aksi Triwulan I) masih di bawah target realisasi fisik Triwulan I sebesar 26,39% (BSKJI menetapkan target realisasi fisik 5% lebih tinggi dari usulan target realisasi keuangan yang disampaikan satker).

#### 4.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah kendala pada beberapa indikator kinerja. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan juga *Nilai Net Promoter Score (NPS)*, kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat partisipasi pelanggan dalam pengisian kuesioner yang ditandai dengan tingkat pengembalian kuesioner yang rendah dibandingkan dengan jumlah kuesioner yang disebar. Selain itu, penyajian data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi secara terpusat dan masih tersebar di masing-masing bagian teknis, sehingga tidak seluruh populasi pelanggan dapat dijangkau untuk diberikan survei. Pada indikator jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, terdapat tantangan berupa meningkatnya persaingan dengan kompetitor yang menawarkan layanan sejenis dengan harga lebih rendah, serta adanya sebagian pelanggan yang beralih ke laboratorium lain khususnya pada layanan pengujian. Di sisi lain, meskipun telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti layanan uji profisiensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN, serta penjualan produk AiMS, capaian jumlah pelanggan belum sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap kompetensi dan ruang lingkup layanan BBSPJPPI, meskipun berbagai upaya promosi telah dilakukan. Selanjutnya, pada indikator persentase pelayanan tepat waktu sesuai *Service Level Agreement (SLA)*, perhitungan masih dilakukan secara manual sehingga rawan terjadi *human error*.

Selain indikator-indikator tersebut, hambatan juga dihadapi pada Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Kendala yang muncul antara lain realisasi PKN belum dapat direncanakan karena pimpinan masih melaksanakan tugas tambahan khusus diluar satker BBSPJPPI, blokir anggaran tahun 2026 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan layanan jasa baru tertunda dan beberapa Jabatan Fungsional memiliki kuota terbatas dan berbayar sehingga ada ketergantungan dengan pihak penyelenggara (instansi pembina) & ketersediaan anggaran.

Pada indikator kinerja persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI terdapat perbedaan dalam pengambilan data transaksi dimana integrasi data SIPPT menggunakan basis data kuitansi pembayaran SINDII sedangkan laporan penerimaan menggunakan basis data rekening koran bank. Pada indikator tingkat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbatasan penjadwalan konsultasi pengembangan aplikasi oleh Pusdatin.

Pada indikator kinerja nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), terdapat kendala ketergantungan pada sistem intranet sehingga pemanfaatan SRIKANDI belum optimal.

Pada indikator nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), kendala yang dihadapi adalah data rencana penarikan dana pada halaman III DIPA BBSPJPPI tidak terupdate dikarenakan proses pengesahan DIPA melampaui batas waktu revisi pemutakhiran hal III DIPA Tw I 2026. Hal ini disebabkan karena pengajuan revisi pemutakhiran hal III DIPA dilakukan bersamaan dengan revisi realokasi anggaran di tingkat Kementerian yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama.

Dari sisi realisasi fisik belum mencapai target dikarenakan beberapa indikator kinerja masih pada proses persiapan data dimana jadwal penilaian indikator kinerja masih menunggu jadwal auditor penilai atau nilai didapat di akhir tahun kegiatan. Misalnya indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik, Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker, nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) dan penilaian dan analisis Laporan Keuangan. Selain itu, proses belanja modal terkait sarpras layanan dan perkantoran serta belanja peningkatan kompetensi SDM internal terkendala adanya blokir anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026. Penjadwalan ulang pelaksanaan belanja modal sarpras layanan dan perkantoran serta pelatihan teknis SDM sebagian menunggu proses pengesahan revisi rekomposisi blokir anggaran yang baru diperoleh pada akhir periode Triwulan I 2026.

#### 4.3 Saran dan Tindak Lanjut

Terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan juga *Nilai Net Promoter Score (NPS)*, tindak lanjut yang dilakukan difokuskan pada peningkatan tingkat respons pelanggan melalui berbagai strategi, antara lain mendorong pengisian kuesioner secara langsung oleh pelanggan yang datang ke BBSPJPPI saat pengantaran sampel uji, melakukan *blasting* WhatsApp dan email secara lebih intensif dan terjadwal, serta memperkuat komunikasi dan sosialisasi melalui media sosial BBSPJPPI. Selain itu, Platform SINDIi direncanakan sebagai sarana pengisian kuesioner sebelum pelanggan mengunduh Laporan Hasil Uji, serta pemberian kuesioner kepada pelanggan layanan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan Uji Profisiensi setelah pelaksanaan audit atau verifikasi. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa tingkat respons pelanggan masih relatif rendah, platform SINDIi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai media penyampaian kuesioner, sosialisasi melalui media sosial belum optimal, serta data jumlah dan identitas pelanggan belum terintegrasi secara terpusat. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan diarahkan pada penyusunan tampilan kuesioner yang lebih menarik, optimalisasi pemanfaatan platform SINDIi, penjadwalan sosialisasi

kuesioner secara rutin setiap awal bulan, serta penyusunan basis data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu, termasuk pengembangan database berbasis nomor order layanan.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk indikator Jumlah perusahaan industri/ pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri, diarahkan pada peningkatan daya tarik dan jangkauan layanan melalui penguatan promosi dengan berpartisipasi dalam berbagai pameran, optimalisasi promosi melalui kanal media BBSPJPPI, perluasan ruang lingkup pengujian terakreditasi, serta penguatan kapasitas layanan melalui kerja sama subkontrak dan kolaborasi dengan balai lain. Upaya lain dilakukan dengan memperkuat hubungan dengan calon pelanggan layanan baru, termasuk konsultan independen pada layanan verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal, serta mendorong seluruh pegawai berperan sebagai agen promosi dalam pelaksanaan layanan. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa meskipun BBSPJPPI telah mengikuti berbagai pameran dan melakukan tindak lanjut kepada pengunjung stan serta menjalankan promosi media sesuai jadwal, hasil yang diperoleh belum optimal. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan difokuskan pada tindak lanjut calon pelanggan secara berkala, antara lain melalui blasting promosi layanan, serta finalisasi revisi tarif agar jasa layanan BBSPJPPI lebih kompetitif dan mampu meningkatkan jumlah pelanggan.

Terkait indikator Persentase pelayanan tepat waktu sesuai *Service Level Agreement (SLA)*. Perlu adanya pengembangan sistem di dalam SINDII yang mengakomodir perhitungan SPM untuk semua layanan jasa BBSPJPPI.

Tindak lanjut indikator Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) difokuskan pada penguatan pengembangan kompetensi ASN melalui koordinasi dengan manajemen dan penyelenggara pelatihan, monitoring ketersediaan anggaran, serta optimalisasi inhouse training dan pelatihan daring. Selain itu, dilakukan evaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai dan simulasi progres perhitungan IP-ASN. Evaluasi pelaksanaan menunjukkan adanya dampak perubahan regulasi perhitungan IP-ASN dan perpindahan jabatan ke JFT, keterbatasan kuota dan anggaran pelatihan PKN, PKA, dan diklat fungsional, serta penyesuaian jadwal pelatihan akibat relaksasi anggaran. Oleh karena itu, rencana perbaikan ke depan diarahkan pada keberlanjutan pemberian izin tugas belajar mandiri, penguatan koordinasi dengan unit pembina jabatan fungsional, penyesuaian jadwal pelatihan sesuai postur anggaran, serta pemastian setiap pegawai memperoleh minimal satu pelatihan teknis setiap tahun.

Terkait indikator kinerja persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, perlu sinkronisasi data (*Mapping*) yaitu membuat fitur auto-mapping di sistem untuk

mencocokkan data kuitansi SINDI dengan data pada rekening koran agar tidak terjadi selisih pengklasifikasian atau mengaktifkan fitur *Virtual Account* agar memberikan kemudahan dalam melacak transaksi keuangan dalam proses pembayaran jasa layanan oleh pelanggan.

Terkait pencapaian indikator kinerja Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan seluruh draf dokumen teknis maksimal satu minggu sebelum jadwal konsultasi agar meminimalkan revisi pada saat pelaksanaan konsultasi dengan pihak Pusdatin Kemenperin.

Sementara itu, pada indikator Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan), diperlukan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan yang fokus pada pengoperasian aplikasi SRIKANDI. Selain itu, seluruh surat yang telah ditandatangani, baik dengan tanda tangan basah maupun TTE, wajib disampaikan ke arsiparis untuk diunggah ke dalam aplikasi SRIKANDI.

Sedangkan untuk indikator Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), tindak lanjutnya adalah pelaksanaan koordinasi antara Tim Pokja Program dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II 2026 serta pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Tw II 2026 di awal bulan sebelum batas akhir penyampaian revisi.

Sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran, direkomendasikan melakukan evaluasi ulang terhadap skala prioritas pengadaan dengan mengutamakan kebutuhan yang mendukung layanan inti dan operasional BBSPJPPI. Penggunaan aset yang telah tersedia juga perlu dioptimalkan, baik melalui rotasi internal antar unit maupun peningkatan intensitas pemakaian guna memperpanjang masa pakai. Sebagai langkah antisipatif, dilakukan pemetaan terhadap barang-barang pengadaan yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negari (TKDN) dan tidak termasuk dalam pemblokiran dengan memanfaatkan data pada portal P4DN. Pengadaan belanja modal tetap dapat dilakukan sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Perindustrian atau Sekretaris Jenderal, guna memastikan seluruh proses tetap sesuai ketentuan dan mendukung kelangsungan operasional prioritas BBSPJPPI.

Untuk mendukung optimalisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya, masing-masing koordinator kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kinerja dan rencana penyerapan anggaran, serta melakukan identifikasi dini terhadap potensi anggaran yang tidak terserap.

# LAMPIRAN

RENCANA AKSI  
TAHUN ANGGARAN 2026

Unit Organisasi : BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Target Antara	Triwulan I Rencana Kegiatan	Target Antara	Triwulan II Rencana Kegiatan	Target Antara	Triwulan III Rencana Kegiatan	Target Antara	Triwulan IV Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 indeks	25%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW I 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	50%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW II 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW II 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW II.	75%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW III 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW III 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW III	100%	1] Penanganan dan pemantauan komplain/keluhan pelanggan TW IV 2] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW IV 3] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW IV. 4] Evaluasi dan rekomendasi peningkatan kualitas layanan.
		2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	990 Perusahaan Industri / Pelaku Usaha / Instansi	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW I	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW II	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW III	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan evaluasi capaian TW IV.
2	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	88,50 Persen	25%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW I. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakan	50%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW II 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW II. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakan	75%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW III 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW III. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakan	100%	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW IV. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian SPM TW IV. 5. Melakukan penjadwalan kegiatan audit tepat waktu sesuai keinginan pelanggan 6. Melakukan pemantauan dan monitoring sampel subkontrak untuk pengujian yang di subkontrakan
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	41 Nilai	25%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I	50%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW II.	75%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW III.	100%	1] Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2] Evaluasi dan penghitungan statistisi penilaian Net Promoter Score (NPS) TW IV.
3	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 Indeks	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI. 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	8.000 Hasil Layanan	25%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	50%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW II.	75%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW III.	100%	1] Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2] Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3] Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4] Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5] Monitoring dan Evaluasi Capaian TW IV.
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,60 Persen	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	50%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	75%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan	100%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3] Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	60 Persen	25%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	50%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	75%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional	100%	1] Melakukan monitoring penerimaan BLU 2] Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
4	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,40 Indeks	25%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	50%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW II.	75%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW III.	100%	1] Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2] Pelaksanaan workshop/ Bimtek/seminar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3] Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4] Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM IV.	Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Agung B)	Des-26
5	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKII	40 Persen	25%	1] Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2] Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKII	50%	1] Mendesain alur kerja integrasi data dari layanan yang terpilih ke dalam sistem informasi BSKII. 2] Pengembangan Sistem Informasi 3] Penyusunan SOP Penggunaan Sistem	75%	1] Uji Coba Integrasi Sistem 2] Sosialisasi dan Pelatihan Pengguna Sistem 3] Evaluasi dan Perbaikan Sistem	100%	1] Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sistem 2] Penyempurnaan Sistem Berdasarkan Evaluasi 3] Sosialisasi Hasil dan Pencapaian Sistem 4] Monitoring dan evaluasi	Ketua Tim Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital (Nur Zen)	Des-26
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	78 Persen	25%	1] Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2] Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3] Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi	50%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	75%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas	100%	1] Mulai pengembangan dan penyesuaian sistem SPBE disesuaikan dengan kesiapan semua bidang 2] Melakukan uji coba implementasi sistem SPBE secara terbatas		
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64 Indeks	30%	1] Mengevaluasi/merevisi nilai IPP Tahun sebelumnya. 2] Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDII. 3] Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan 5] Update dan upload informasi jasa layanan Balai melalui medsos secara berkala dan setiap saat. 6] Penyebaran informasi kapasitas layanan melalui media Kempenperin	50%	1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI	75%	1] Pengembangan/ pemutakhiran SINDII. 2] Update website secara berkala 3] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 4] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 5] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 6] Publikasi kapasitas layanan melalui penyelenggaraan podcast OASI	100%	1] Update website secara berkala 2] Update Medsos secara berkala dan setiap saat 3] Pemutakhiran sistim informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat 4] Penyediaan informasi layanan publik yang tersaji pada desk layanan publik 5] Self assesmen standart pelayanan publik untuk mengukur capaian nilai standart layanan publik yang telah dilaksanakan		
6	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62 Persen	15%	1] Koordinasi penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2] Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III	40%	1] Koordinasi penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja	85%	1] Penyiapan dokumen kelengkapan pelaksanaan audit kinerja 2] Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan audit kinerja dengan Tim Auditor ITjen 3] Penyusunan dan penyampaian rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan 4] Koordinasi penyiapan dan penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pengawasan 5] Koordinasi dengan Tim Auditor ITjen untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100%	1] Koordinasi dengan Setjjen untuk memonitoring penerbitan surat penyelesaian hasil pengawasan	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh AW)	Des-26
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	73 Nilai	25%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal.	50%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW II. 2] Mempersiapkan pengusulan data dukung dan mengupload di link yang disediakan	75%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW III. 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta.	100%	1] Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW IV. 2] Verifikasi kegiatan autentisitas arsip yang tercipta. 3] Tindak lanjut hasil evaluasi penilaian	Ketua Kelompok Kerja Umum (Sanjoto)	Des-26

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Timeline
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
7	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45 Nilai	30%	1] Penyusunan dokumen Tapkin 2] Penyusunan dokumen Renkin 3] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4] Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5] Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJ dan Tim Itje	60%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw II) 2] Penyiapan data dukung penilaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	80%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw III)	100%	1] Pelaksanaan monev kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw IV dan LAKIP)	Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh Aryo W)	Des-26
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,40 Nilai	25%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4] Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5] Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu.	50%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan II dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	75%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan III dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	100%	1] Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan IV dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2] Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3] Berkoordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan di tiap triwulan 4] Memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam), Ketua Kelompok Kerja Program (Kukuh Aryo W)	
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,25 Nilai	25%	1] Menyusun laporan keuangan tahunan (Unaudited) 2] Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3] Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4] Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Desember tahun sebelumnya 5] Mendukung pelaksanaan audit Laporan Keuangan tahunan	50%	1] Menyusun laporan keuangan tahunan (Audited) 2] Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3] Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4] Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan April dan Mei tahun berjalan	75%	1] Menyusun laporan keuangan semester I (Unaudited) 2] Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3] Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4] Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Juni, Juli dan Agustus tahun berjalan 5] Mendukung pelaksanaan penilaian laporan keuangan tahunan (Audited) oleh Biro Keuangan	100%	1] Menyusun laporan keuangan triwulan III (Unaudited) 2] Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3] Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4] Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan September, Oktober, dan November tahun berjalan 5] Mendukung pelaksanaan audit PIPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-September tahun berjalan 6] Mendukung pelaksanaan audit BPK untuk transaksi keuangan bulan Januari-November tahun berjalan	Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan BMN (Misbakhul Anam)	
8	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81 Persen	30%	1] Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2] Pengisian aplikasi P3DN 3] Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6] Rekapitulasi realisasi penggunaan	50%	1] Melakukan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan dan rencana penarikan dana yang telah disusun. 2] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 3] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 4] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	75%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	100%	1] Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 2] Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 3] Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging	Kabag TU , Ketua Kelompok Kerja Umum ( Sanyoto ) .	Des-26



REALISASI RENCANA AKSI SAMPAI TRIWULAN I TA. 2026

SATKER BBSPJPI

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I		Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						% Fisik						Rencana	Realisasi
						Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa Industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 Persen	3,69	100,27%	25	25	1) Penanganan dan pemantauan komplain/keuhan pelanggan TW I 2) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan TW I 3) Evaluasi dan penghitungan statistik penilaian IKM (IPP dan IPAK) TW I.	B1-B3 : Penyebaran kuesioner ke pelanggan dengan jumlah kuesioner yang kembali Triwulan I TA 2026 sebanyak 57 buah dengan nilai 3,69.	Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan ( masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis ) sehingga tidak semua pelanggan pada semua jasa layanan yang dapat diberikan kuesioner IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ). Selain itu, sistem SINDII belum mengakomodir keharusan untuk mengisi kuesioner pelanggan sebelum perusahaan mengunggah LHU mandiri	1. Membuat tampilan kuesioner yang lebih menarik, sehingga minat pelanggan untuk mengisi kuesioner semakin meningkat. 2. Optimalisasi platform SINDII sebagai sarana dan prasarana penyampaian dan pengisian kuesioner agar dapat teralisasi dimana pelanggan diharuskan mengisi kuesioner IKM sebelum mengunggah LHU. 3. Penjadwalan sosialisasi penyampaian dan pengisian kuesioner terintegrasi BBSPJPI dilakukan setiap awal bulan. 4. Membuat dokumen data jumlah dan identitas pelanggan dalam satu pintu (rekapitulasi lengkap, terutama narahubung). Selain itu, dapat pula membuat database melalui SINDII berdasarkan nomor order layanan yang digunakan (nomor order masih dalam tahap pengembangan).	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri.	Triwulan II 2026
		2. Jumlah perusahaan Industri/pelaku usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa Industri*	990 Perusaha an industri/ pelaka/u saha/Instansi	298	30,10%	25	25	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPJPI 5) Monitoring dan evaluasi capaian TW I.	B1-B3 : Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi sampai TW I sebanyak 298 perusahaan industri/pelaku usaha/Instansi.	-Adanya identifikasi penurunan permintaan layanan pengujian penanganan pencemaran dikarekan beberapa pelanggan beralih ke laboratorium milik DLH maupun kompetitor yang lebih murah. -Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, audit CEMS, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan	Meningkatkan promosi baik secara online maupun offline ( pameran-pameran ), memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPJPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri.	Triwulan II 2026
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	88,5 Persen	96,93	109,53%	25	25	1. Melakukan review terhadap SPK atau permintaan jasa layanan 2. Melakukan perawatan terhadap peralatan pengujian/ kalibrasi 3. Melakukan kegiatan pengambilan sampel layanan jasa teknis TW I	B1-B3 : 1.Melakukan penyelesaian semua jenis layanan sesuai SPM. 2.Pemeliharaan peralatan 3.Monitoring dan evaluasi SPM layanan secara berkala. 4.Total sampel Bulan Januari-Maret 1598 sampel. Sedangkan sampel yang sesuai SPM sebanyak 1549 sampel.Sehingga SPM sebesar 96,93 %.	Perhitungan SLA masih manual sehingga rawan human error.	Dilakukan pengulangan verifikasi data kepada masing-masing tim untuk memitigasi terjadinya human error.	Ketua Tim Kerja PJI, Ketua Tim Kerja Pengujian Lingkungan dan Instrumen; Ketua Tim Kerja Standardisasi,Sertifikasi,Inspeksi dan Verifikasi Industri ; Ketua Tim Kerja Kalibrasi Lingkungan dan Instrumen, Ketua Tim Kerja Optik.	Triwulan II 2026
		2. Nilai Net Promoter Score (NPS)	41 Nilai	72	175,61%	25	25	1) Penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 2) Evaluasi dan penghitungan statistik penilaian Net Promoter Score (NPS) TW I.	B1 - B3: jumlah responden sampai Maret 2026 sebanyak 57 responden dengan promotor 42 responden, passives 14 pelanggan dan detractors 1 pelanggan	-Tingkat pengembalian kuesioner masih rendah dibanding jumlah kuesioner yang disebar. -Belum terintegrasinya penyajian data jumlah dan identitas pelanggan ( masih terpisah-pisah pada masing-masing bagian teknis) sehingga tidak semua populasi dapat diberikan survey NPS	Melakukan berbagai strategi untuk menarik minat pelanggan supaya mengisi survey NPS sehingga kuesioner yang diberikan mendapatkan feedback yang kembali ke BBSPJPI seperti: menargetkan pelanggan yang datang ke BBSPJPI (mengantar sampel uji) untuk langsung mengisi kuesioner di penerimaan contoh; melakukan blasting WA dan email secara lebih intens dan terjadwal, komunikasi efektif serta sosialisasi melalui media sosial BBSPJPI. Platform SINDII bisa digunakan sebagai sarana dan prasarana keharusan pelanggan untuk mengisi survey NPS sebelum mengunggah laporan hasil uji. Untuk pelanggan sertifikasi, verifikasi TKDN, dan PUP, survey NPS diberikan setelah pelaksanaan audit,surveilan maupun verifikasi	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri	Triwulan II 2026
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 Indeks	-	-	25	25	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPJPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B1: Penerimaan sampai Bulan Januari 2026 sebesar Rp. 2.412.518.594 (11,30%) dari target Rp. 21.351.876.000,- B2: Penerimaan sampai bulan Februari 2026 sebesar Rp. 3.690.844.386,- (17,29% dari target) B3: Penerimaan PNBP BBSPJPI sampai dengan bulan Maret 2026 sebesar Rp. 4.349.272.365,- ( 20,37 % dari target)	1.Adanya kompetensi dari kompetitor layanan yang sejenis (adanya hibmauan dari DLH kepada industri untuk menguji di fasilitas laboratorium yang dimiliki DLH). 2.Adanya kompetensi dari kompetitor layanan sejenis dengan harga yang lebih murah. 3.Ruang lingkup layanan pengujian,kalibrasi,sertifikasi masih terbatas. 4.Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, Verifikasi TKDN, dan penjualan produk AIMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 5.Proses pengalihan untuk kontrak Kerjasama pemantauan lingkungan cukup rumit dan memerlukan waktu yang lama. 6.Masyarakat belum familiar dan terinformasi terkait kompetensi dan lingkup jasa layanan BBSPJPI dikarekan masih kurangnya informasi tentang BBSPJPI	1.Meningkatkan promosi layanan baru BBSPJPI yang meliputi uji RATA, CGA, CEMS, Uji Profisiensi, Pemeriksaan Halal, TKDN, dan LSP melalui penyusunan portofolio layanan yang komprehensif serta perluasan jejaring kerja (networking) dengan memanfaatkan media sosial resmi balat dan keikutsertaan dalam kegiatan pameran. 2.Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian dan kalibrasi yang terakreditasi dengan harga yang bersaing (dipengaruhi upaya modernisasi peralatan). 3.Mendorong peluang pengembangan jasa layanan baru yang memiliki prospek terhadap peningkatan penerimaan PNBP (kalibrasi AQMS, sertifikasi profesi, verifikasi dan validasi GRK). 4.Menguatkan jasa layanan baru melalui (PUP) melalui proses bimtek kepada SDM terkait dan memulai untuk persiapan proses akreditasi 5.Menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen (verifikasi TKDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik untuk melakukan proses TKDN dan halal di BBSPJPI	Ketua Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri ,Kapokja Keuangan dan BMN	Triwulan IV 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target		Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I		Kegiatan		Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							% Fisik		Rencana	Realisasi				
							Target	Realisasi						
		2. Jumlah hasil layanan jasa industri	8000	Hasil Layanan	1637	20,46%	25	25	1) Promosi dan publikasi jasa layanan BBSPPPI 2) Pembuatan penawaran dan kontrak kerjasama jasa layanan 3) Pemberian jasa layanan teknis ke industri sesuai permintaan yang disepakati 4) Menjalin komunikasi efektif dan berkelanjutan kepada pelanggan untuk menjaga kesetiaan pelanggan kepada BBSPPPI 5) Monitoring dan Evaluasi Capaian TW I.	B1: Jumlah layanan: jasa industri Januari 2026 sebesar 495 hasil layanan. B2: Jumlah layanan: jasa industri sampai Februari 2026 sebesar 1.194 hasil layanan B3: Jumlah layanan: jasa industri sampai Maret 2026 sebesar 1.637 hasil layanan	1. Adanya kompetensi dari kompetitor dengan layanan yang sejenis dengan harga lebih murah 2. Beberapa perusahaan beralih ke lab lain pada jasa layanan pengujian 3. Telah dikembangkan berbagai layanan baru seperti Penyelenggara Uji profisiensi, pemeriksaan halal, verifikasi TKDN dan penjualan produk AMS tetapi belum didapatkan hasil jumlah pelanggan sesuai harapan 4. Masyarakat tidak/delum paham tentang kompetensi BBSPPPI secara umum khususnya terkait pengembangan layanan baru BBSPPPI, dikarenakan kurangnya mengenal/informasi tentang BBSPPPI meski beragam promosi telah dilakukan	Meningkatkan promosi baik secara online maupun offline ( pameran-pameran ), memperluas ruang lingkup layanan jasa yang terakreditasi, menguatkan kemampuan layanan melalui kerjasama subkon, menguatkan hubungan kepada calon pelanggan layanan baru dan konsultan independen ( verifikasi TDN dan pemeriksaan halal) agar tertarik melakukan jasa layanan di BBSPPPI dan yang tidak kalah penting adalah semua pegawai menjadi agen pemasaran dan promosi bersama saat melakukan jasa layanan	Ketua Tim Kerja PJI	Triwulan II 2026
		3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	14,6	Persen	3,41	23,36%	25	25	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan inventarisasi aset yang menjadi sumber penerimaan BLU 3) Monitoring penghapusan aset tetap pada tahun berjalan 4) Melakukan pertanggungjawaban belanja modal RM&BLU	B1-3 : 1. Melakukan monitoring penerimaan BLU Januari-Maret 2026 2. Melakukan pengesahan penerimaan Januari-Maret 2026. 3. Update nilai buku aset satuan kerja. Dimana Penerimaan Rp 4.349.272.365,- sedangkan aset tetap Rp.1127,689,362,266	Pada bulan Januari-Maret 2026 sedang dilaksanakan audit Laporan Keuangan T.A. 2025 yg menyebabkan nilai aset tetap pada neraca bulan Maret 2026 belum dapat merepresentasikan nilai aset tetap dengan tepat	Nilai aset tetap per triwulan I tahun 2026 dihitung menggunakan nilai total aset yang tersedia pada neraca bulan Desember 2025 (Unaudited) ditambah dengan pembelian aset (belanja modal) sampai bulan Maret 2026	Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan EMN	Triwulan IV 2026
		4. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	60	Persen	55,46	92,43%	25	25	1) Melakukan monitoring penerimaan BLU 2) Melakukan update realisasi belanja/pengeluaran operasional 3) Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dengan sumber dana RM dan/atau BLU	B1-B3 : 1. Melakukan monitoring penerimaan BLU Bulan Januari-Maret 2026. 2. Melakukan pengesahan penerimaan dan belanja BLU Januari-Maret 2026. 3. Melakukan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, belanja persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja jasa dengan sumber dana RM dan/atau BLU Januari-Maret 2026. Dimana pendapatan operasional Rp.4.349.272.365,- sedangkan belanja operasional Rp.7.841.894.556	Sampai dengan bulan Maret 2026 belum dilakukan tutup buku periode 14 tahun 2025 (Audited) karena sedang dilaksanakan audit Laporan Keuangan T.A. 2025, sehingga Laporan Operasional belum dapat merepresentasikan: Jumlah pendapatan dan belanja operasional dengan tepat.	Karena sampai dengan bulan Maret 2026 belum dilakukan jurnal balik atas transaksi pendapatan & belanja tahun 2025, sehingga pendapatan operasional dapat dihitung menggunakan total realisasi penerimaan BLU sampai bulan Maret 2026, sedangkan belanja operasional dapat dihitung menggunakan total realisasi pengeluaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran per Maret 2026 (tidak termasuk belanja modal) ditambah transaksi yang mempengaruhi secara akrual seperti persediaan awal dan dikurangi sisa persediaan bulan Maret 2026.	Kabag TU ,Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan EMN	Triwulan IV 2026
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,4	Indeks	81,4	100,00%	25	25	1) Koordinasi dan penyusunan rencana diklat teknis 20 JPL dan diklat struktural 2) Pelaksanaan workshop/ Bimtek/semnar/webinar untuk mendukung peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai 3) Pengumpulan bukti peningkatan kompetensi SDM berkala 4) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM TW I.	B1-3 : 1. Menyusun rencana peningkatan kompetensi SDM sesuai kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran. 2. Fasilitas diklat 3. Pembaharuan Informasi pendidikan dan pelatihan pegawai.	1. Realisasi PKN belum dapat direncanakan karena pimpinan masih melaksanakan tugas tambahan khusus di luar satker BBSPPPI 2. Blokir Anggaran tahun 2026 mengakibatkan volume rencana peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan layanan jasa baru tertunda 3. Beberapa Jabatan Fungsional memiliki kuota terbatas dan berbayar sehingga ada ketergantungan dengan penyelenggara (Instansi pembina) & ketersediaan anggaran 4. Untuk Workshop/ Seminar/ Webinar/ Bimtek tidak menerbitkan sertifikat dan mayoritas peserta terlambat mendokumentasikan kelengkapan (ST, Materi, Foto/Screenshoot)	Berkoordinasi dengan manajemen dan tim kerja terkait persediaan realisasi pelatihan yang disuliskan tahun 2026, monitoring ketersediaan anggaran untuk diklat berbayar, koordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara PKN & PKA, mengoptimalkan Inhouse Training dan Pelatihan Daring untuk Pelatihan Teknis 20 JPL/ Workshop/ BimTek/ Sosialisasi, mengevaluasi capaian peningkatan kompetensi pegawai yang telah diklat dan mensimulasi progress perhitungan IP-ASN yang telah dicapai	Kabag Tata Usaha, Ketua Kelompok Organisasi dan Sumber Daya Manusia.	Triwulan IV 2026
SK.4	Penguatan Sistem Informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	40	Persen	20	50,00%	25	25	1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2) Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI	B1: Melakukan identifikasi analisis kebutuhan data jenis layanan sesuai dengan update manual API V.7 B2: Penyesuaian manual operasional modul keuangan B3: Evaluasi uji coba integrasi data untuk layanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi.	* Perbedaan dalam pengambilan data transaksi dimana integrasi data SIPP menggunakan basis data kuitansi peribayaran SINDI sedangkan untuk pelaporan penerimaan menggunakan basis data rekening koran dari Bank BNI yang terupdate yang mempunyai keteratan dalam perbedaan pengklasifikasian layanan dan sub layanan. * Perlu penambahan input pengesahan transaksi penerimaan pada modul keuangan SINDI untuk melengkapi kebutuhan data integrasi SIPP * Keterbatasan layanan yang terakomodir dalam aplikasi SINDI (Pengujian dan Kalibrasi) membutuhkan update modul untuk mengakomodir kebutuhan data proses transaksi dari awal sampai akhir.	1) Sinkronisasi Data (Mapping) : Membuat fitur auto-mapping di sistem untuk mencocokkan data kuitansi SINDI dengan data rekening koran BNI agar tidak terjadi selisih data pengklasifikasian azas mengaktifkan fitur Virtual Account dalam kemudahan transaksi layanan 2) Update Modul Keuangan : Menambahkan fitur Pengesahan Transaksi di aplikasi SINDI sebagai syarat wajib sebelum data dikirim ke API SIPP. 3) Perluasan Modul Layanan : Melakukan pengembangan fitur end-to-end (awal hingga akhir) untuk seluruh jenis layanan di SINDI, agar semua transaksi terdata otomatis tanpa perlu input manual tambahan.	Ketua Tim Kerja PJI, Ketua Kapokja Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital.	Triwulan IV 2026
		2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	78	Persen	20	25,64%	25	25	1) Presentase dan analisis kebutuhan semua jenis layanan yang relevan untuk integrasi 2) Menganalisis jenis data yang perlu diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI 1) Pemetaan seluruh infrastruktur yang sudah ada dalam pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik yang dapat diintegrasikan. 2) Melakukan analisis kebutuhan sistem informasi untuk penerapan SPBE, termasuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan. 3) Menyusun rencana pengembangan dan penerapan SPBE yang mencakup prioritas layanan dan tahap implementasi	B1-3 : 1) Melakukan pemetaan seluruh Infrastruktur SPBE BBSPPPI (SINDI, UDARAKU, WEBSITE, IOT) serta menginventarisasi aset TIK untuk kebutuhan penyusunan usulan anggaran SPBE 2) Menganalisis semua kebutuhan tata kelola SPBE sebagai bahan penyusunan dokumen usulan anggaran SPBE 2027 3) Penyusunan dokumen Usulan Rencana Anggaran SPBE BBSPPPI Tahun 2027 serta penyampaian ke Pusdatin Kemenperin	Keterbatasan penjadwalan konsultasi pengembangan aplikasi oleh Pusdatin membutuhkan penyediaan dokumentasi teknis lebih teliti dan lengkap untuk mengoptimalkan proses review	Menyelesaikan seluruh draf dokumen teknis maksimal satu minggu sebelum jadwal konsultasi agar meminimalkan revisi	Ketua Tim Kerja PJI, Ketua Kapokja Pengelola dan Pengembangan Teknologi dan Informasi Digital.	Triwulan IV 2026
		3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,64	Indeks	Penilaian self assessment di akhir tahun		25	25	1) Mengevaluasi/meretiv nilai IPP Tahun sebelumnya. 2) Perencanaan pengembangan/pemutakhiran SINDI. 3) Update standar pelayanan dan pengelolaan informasi publik (Banner/leaflet, website) secara berkala. 4) Pemutakhiran sistem informasi digital terintegrasi secara berkala memuat informasi yg mudah diakses oleh masyarakat tanpa gangguan	B1-3 : 1) Meninjau relevansi bukti dukung IPP dari tahun sebelumnya 2) Memelihara penyampaian informasi dan pelayanan kehumasan kepada pelanggan tersampaikan dengan baik dan benar 3) Memutakhirkan konten SIPP dan website 4) Penyampaian Informasi dan pelayanan kehumasan melalui semua media di BBSPPPI (elektronik dan non elektronik) 5) Menindaklanjuti hasil penyampaian dokumen/ Informasi kepada pelanggan.	Tidak ada kendala	Menyampaikan kembali kendala akses ke BSKJI untuk akun SP4N Laporan dan SIPP.	Ketua Tim Kerja PJI	Triwulan II 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Sampai Triwulan I		Kendala	Tindak Lanjut	Jangka Waktu Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
						% Fisik						Rencana	Realisasi	
						Target	Realisasi							
SK.5	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	62	Persen	Belum ada jadwal audit	15	15	1) Koordinasi penyusunan dan persiapan laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya 2) Koordinasi jadwal pelaksanaan audit kinerja dengan Inspektorat III 3) Koordinasi dengan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPP/TA 2026 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok kerja 4) Koordinasi dengan monitoring progres penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2025 dengan Tim SPI	B 1-3 : 1) Penyampaian Nota Dinas Kepala BBSPP/PP Nomor 1/BBSPP/PP/1/PR/1/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPP/PP TA 2025 dan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2) Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Akhir Kegiatan BBSPP/PP TA 2026 oleh masing-masing Tim Kerja/Tim Kelompok kerja 3) Koordinasi dan monitoring progres penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Intern 2025 dengan Tim SPI	Penyiapan dokumen kelengkapan audit kinerja tahun 2025 untuk aspek perencanaan dan penganggaran	Memonitoring penyusunan dan penyampaian laporan akhir kegiatan dan memastikan laporan akhir kegiatan tersedia sebelum pelaksanaan audit kinerja oleh Tim Inspektorat Jenderal	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program.	Triwulan II 2026	
		2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	73	Nilai	Belum ada jadwal audit	25	25	1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal. 3) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I, yg meliputi: - Penciptaan : 63 surat masuk & 277 surat keluar; - Pemeliharaan: 277 arsip aktif & 666 arsip inaktif; alih media: 9 arsip statis - Penggunaan 6 pelayanan; & - Penyusutan: 369 arsip dipindahkan & 203 arsip usul musnah. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal dg melukukan: - Koordinasi bersama Biro Umum sbg pembina, dg ketua tim kerja maupun sesama tim arsip. - Melakukan Peningkatan SDM Kearsipan dg mengikuti Pembinaan SDM kearsipan secara online.	B1-3 : 1) Penyelenggaraan tata kelola arsip secara fisik dan digital pada Aplikasi Srikandi sepanjang TW I, yg meliputi: - Penciptaan : 63 surat masuk & 277 surat keluar; - Pemeliharaan: 277 arsip aktif & 666 arsip inaktif; alih media: 9 arsip statis - Penggunaan 6 pelayanan; & - Penyusutan: 369 arsip dipindahkan & 203 arsip usul musnah. 2) Mempersiapkan pengusulan data dukung dan pengisian form pengawasan internal dg melukukan: - Koordinasi bersama Biro Umum sbg pembina, dg ketua tim kerja maupun sesama tim arsip. - Melakukan Peningkatan SDM Kearsipan dg mengikuti Pembinaan SDM kearsipan secara online.	1) Ketergantungan pada sistem Intranet/intranet masih sangat kuat, sehingga pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum optimal. 2) Keterbatasan SDM kearsipan baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis, terutama dalam pengelolaan arsip digital dan alih media. 3) Koordinasi lintas unit pengolah belum optimal. 4) Masih diperlukan penguatan komitmen unit kerja dalam tertib arsip dan penyimpanan data dukung. 5) Keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung digitalisasi.	1. Mengintegrasikan pengelolaan arsip ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBB) untuk transparansi dan kecepatan akses 2. Menyelenggarakan pelatihan teknis kearsipan secara berkala bagi pengelola arsip.	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum	Triwulan II 2026	
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	79,45	Nilai	84,1	105,85%	30	30	1) Penyusunan dokumen Tapkin 2) Penyusunan dokumen Renkin 3) Pelaksanaan money kinerja dan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja tahun berjalan (PP 39 Tw I) 4) Penyiapan data dukung penilaian SAKIP sesuai Permenpan RB 88/2021 5) Koordinasi pelaksanaan penilaian SAKIP dengan Ses BSKJI dan Tim Itjen	B1-B3 : 1) Pengumpulan dan pengolahan data kinerja bulanan 2) Penyiapan dokumen pendukung penitlan Implementasi SAKIP 2025 pada satker BBSPP/PP 3) Evaluasi implementasi SAKIP pada satker BBSPP/PP telah dilaksanakan pada 3 Maret 2026 secara offline dengan Tim Evaluator Inspektorat III 4) Penyusunan draft laporan PP 39 Triwulan I 2026	Tidak ada kendala	1) Penyusunan dan penyampaian Laporan PP 39 Triwulan I 2026 secara tepat waktu 2) Penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2025.	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Program	Triwulan II 2026
		2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA	93,4	Nilai	59,2	63,38%	25	25	1) Membuat rencana penarikan dana bulanan triwulan I dan melakukan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi belanja 3) Pengajuan SPM tepat waktu sesuai ketentuan TW I 4) Penyampaian data perjanjian/kontrak dan penyelesaian tagihan SPM LS Kontakual yang didaftarkan dan/ diajukan ke KPPN secara tepat waktu 5) Pelaporan capaian output secara berkala dan tepat waktu	B1-3: - Telah dibuat rencana penarikan dana bulanan, - monitoring realisasi belanja. Berkordinasi dengan PPK terkait rencana pelaksanaan kegiatan tiap triwulan. - Pengajuan revisi kewenangan KPA terkait rekomporsi blokir pada aplikasi SAKTI untuk mendorong realisasi penyerapan anggaran	Data rencana penarikan dana pada halaman III DIPA BBSPP/PP tidak terupdate dikarenakan proses pengesahan DIPA melampaui batas waktu revisi pemutakhiran hal III DIPA Tw I 2026. Hal ini disebabkan karena pengajuan revisi pemutakhiran hal III DIPA dilakukan bersamaan dengan revisi realokasi anggaran di tingkat Kementerian yang prosesnya membutuhkan waktu cukup lama	• Koordinasi dengan Tim Pengelola Keuangan terkait usulan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II 2026 • Pengajuan usulan revisi pemutakhiran RPD Tw II 2026 di awal bulan sebelum batas akhir penyampaian revisi.	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan EMN.	Triwulan IV 2026
		3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,25	Nilai	Belum ada jadwal		25	25	1) Menyusun laporan keuangan tahunan (Unaudited) 2) Melakukan pertanggung jawaban belanja Rupiah Murni 3) Melakukan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLU 4) Melakukan penyelesaian TDK dan to do list, serta rekonsiliasi SAKTI-SPAN bulan Desember tahun sebelumnya	B1-B3 : 1) Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 (unaudited) 2) Menyiapkan dokumen untuk pelaksanaan Audit KAP	Terdapat kesalahan pencatatan akun, yaitu belanja meja stand pameran portable dengan nominal Rp. 1.000.000. Seharusnya masuk Akun (53712) Belanja Modal. Namun dalam LK masuk ke akun (525162) Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomtabel	Terkait pencatatan akun sudah tidak bisa di rubah dikarenakan pencatatan akun di Laporan Keuangan 2025 sehingga diberikan penjelasan di Laporan Keuangannya. Untuk kedepannya melakukan pembelian barang ekstrakomtabel sesuai dengan batas kapitalisasi yang telah ditentukan yaitu tidak melebihi dari Rp. 1.000.000	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Keuangan dan EMN.	Triwulan IV 2026
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	Persen	99,78	123,19%	30	30	1) Identifikasi potensi penggunaan produk/jasa dalam negeri pada kegiatan pengadaan barang/jasa dalam DIPA tahun berjalan 2) Pengisian aplikasi P3DN 3) Pengajuan persetujuan tertulis kepada Menteri Perindustrian/Pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan barang/jasa yang dipenuhi dari impor atau TKDN di bawah 25% 4) Mengutamakan pembelian produk dalam negeri dalam proses pengadaan. Pemeriksaan barang-barang berTKDN pada website P3DN sebelum melakukan pembelian/pengadaan 5) Melakukan tagging realisasi TKDN atas realisasi belanja pada aplikasi e-Mon APBN 6) Rekapitulasi realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan tagging P3DN dalam aplikasi e-Mon APBN	B1-3 : 1. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. 2. Melakukan tagging realisasi TKDN pada aplikasi SAKTI. 3. TKDN sampai TW I dr aplikasi SAKTI sebesar 99,78%	1. Penggunaan langganan lisensi aplikasi video conference yang belum didapatkan dari layanan dalam negeri. 2. Diberlakukan blokir anggaran belanja yang berpotensi memiliki nilai TKDN. 3. Beberapa belanja barang, khususnya untuk bahan kimia, belanja modal (mesin/peralatan) masih didapatkan dari impor.	• Melakukan refocusing dari anggaran yang diblokir dan melakukan pengadaan belanja modal yang telah erendapatkan izin dari Menperin/Sekjend. • Melakukan pemetaan barang-barang pengadaan yang memiliki KDN dan sertifikat TKDN melalui website P3DN. • Tetap melakukan pengadaan dari akun yang telah ditentukan dengan mengutamakan produk yang memiliki sertifikat TKDN atau P3DN.	Kabag TU, Ketua Kelompok Kerja Umum	Triwulan II 2026



..... April 2026  
Kepala BBSPP/PP *drp*

Sofyari Rahman



# Thank You

## CONTACT US

+62 821-3452-5006

[bbspjppi.kemenperin@gmail.com](mailto:bbspjppi.kemenperin@gmail.com)

[bbspjppi.kemenperin.go.id](http://bbspjppi.kemenperin.go.id)